



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA



BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA



BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023” dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.



Penajam, Maret 2024

Pj. Bupati Penajam Paser Utara,

Drs. Makmur Marbun, M.Si



Perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur sangat penting untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Secara garis besar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 dan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dari RPJMD dan RKPD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, serta untuk mengukur kinerja ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Hasil capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2023 secara keseluruhan dan rinci dituangkan pada BAB III Akuntabilitas Kinerja. Sebagian besar indikator kinerja sasaran dapat tercapai dengan hasil sangat memuaskan. Beberapa indikator kinerja menunjukkan belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi, komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat.

Dari 19 sasaran strategis dengan 36 indikator kinerja, berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rata-rata nilai capaian kerja sebesar 262,33% dalam kategori “Sangat Memuaskan”.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	iv	
Daftar Tabel	v	
Daftar Grafik	vii	
BAB I PENDAHULUAN	1	
	1	A. Gambaran Umum Daerah
	4	B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi
	5	C. Sumber Daya Aparatur
	7	D. Isu Strategis dan Permasalahannya
	23	E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26	
	26	A. Visi dan Misi
	28	B. Tujuan dan Sasaran
	30	C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan
	37	D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	44	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46	
	46	A. Capaian Kinerja Organisasi
	124	B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP	135	
	131	C. Efisiensi Penggunaan Anggaran
Lampiran I		Rencana Kinerja Tahunan 2023
Lampiran II		Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran III		Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Lampiran IV		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	2
Tabel 1.2	Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	3
Tabel 2.1	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	28
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara	31
Tabel 2.3	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	37
Tabel 2.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 3.3	Pelatihan Ketenagakerjaan di Tahun 2023	54
Tabel 3.4	Nilai Investasi Tahun 2019 - 2023	57
Tabel 3.5	Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.....	65
Tabel 3.6	Kategori Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Berdasarkan Skor	72
Tabel 3.7	Komposisi Konsumsi Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan	78
Tabel 3.8	Komposisi Pola Pangan Harapan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	79
Tabel 3.9	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2023	92
Tabel 3.10	Capaian SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	99
Tabel 3.11	Rekomendasi dan Tindaklanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Oleh KemenPAN RB RI Tahun 2023	116
Tabel 3.12	Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	123
Tabel 3.13	Laporan Realisasi APBD T.A 2023	126

Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2023	127
Tabel 3.15	Skala Nilai Peringkat Efisiensi	132
Tabel 3.16	Pengukuran Efisiensi Anggaran	132



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	3
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2023	3
Grafik 1.3	Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	6
Grafik 1.4	Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023	6
Grafik 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023	47
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 ...	49
Grafik 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023	50
Grafik 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	53
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023	53
Grafik 3.6	Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	60
Grafik 3.7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023	61
Grafik 3.8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	62
Grafik 3.9	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023	63
Grafik 3.10	Angka Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	64
Grafik 3.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023	65
Grafik 3.12	Indeks Pemberdayaan Gender Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022	71
Grafik 3.13	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2022	71
Grafik 3.14	Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2022	73
Grafik 3.15	Kabupaten/ Kota Layak Anak di Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022 ..	73



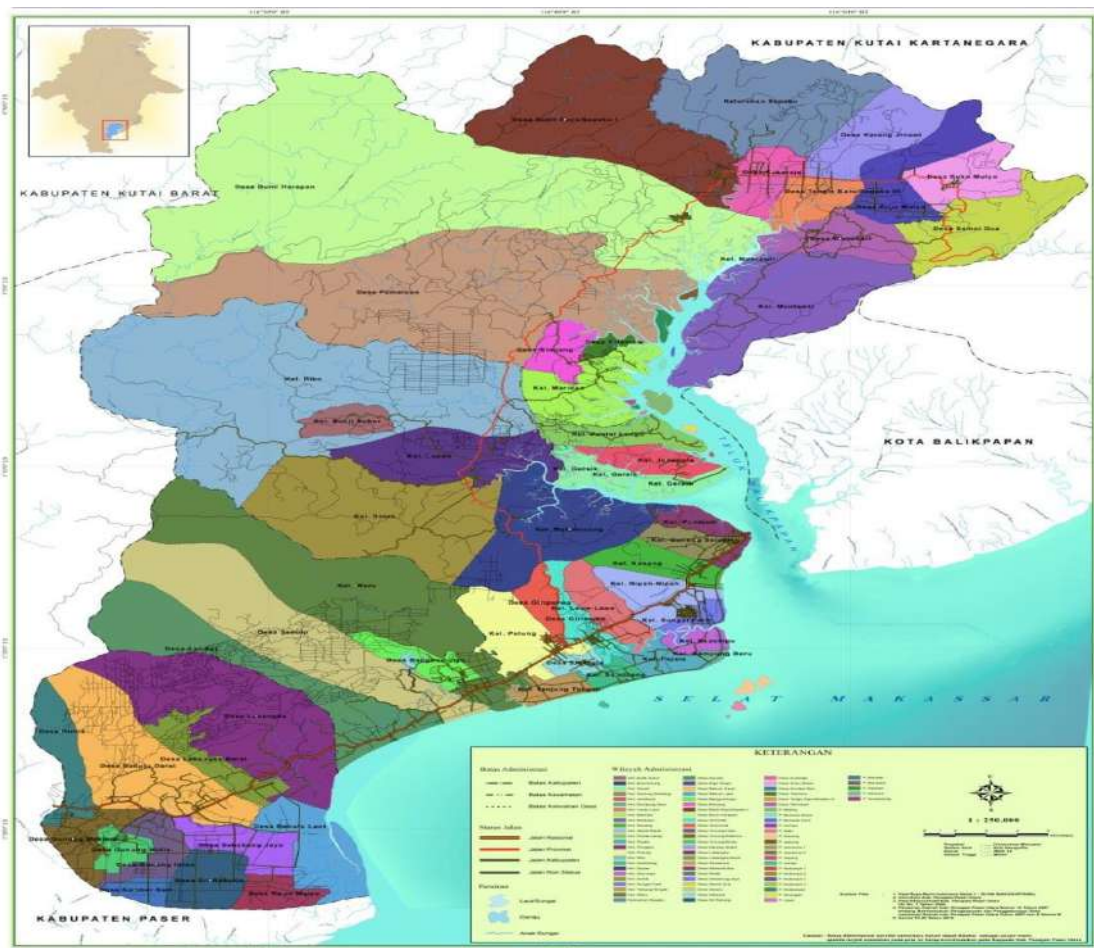
Grafik 3.16 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2023.....	78
Grafik 3.17 Kunjungan Wisata Tahun 2019-2023	82
Grafik 3.18 Jumlah Perizinan yang Tertangani Tahun 2019-2023.....	87
Grafik 3.19 Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023	90
Grafik 3.20 Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023	90
Grafik 3.21 Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023	92
Grafik 3.22 Persentase Kemiskinan Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023	93
Grafik 3.23 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2019 – 2023	102
Grafik 3.24 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	109
Grafik 3.25 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2023	114
Grafik 3.26 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/ Perkada Tahun 2019 – 2023	122
Grafik 3.27 Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2023	125



BAB I

PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Daerah



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara



00°48'29"-01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30"- 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km².

Secara administratif pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

Tabel 1.1 Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			
19 Kelurahan, 4 Desa	1 Kelurahan, 3 Desa	12 Desa	4 Kelurahan, 11 Desa

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjumlah 196.566 jiwa. Penyebaran penduduk di masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas

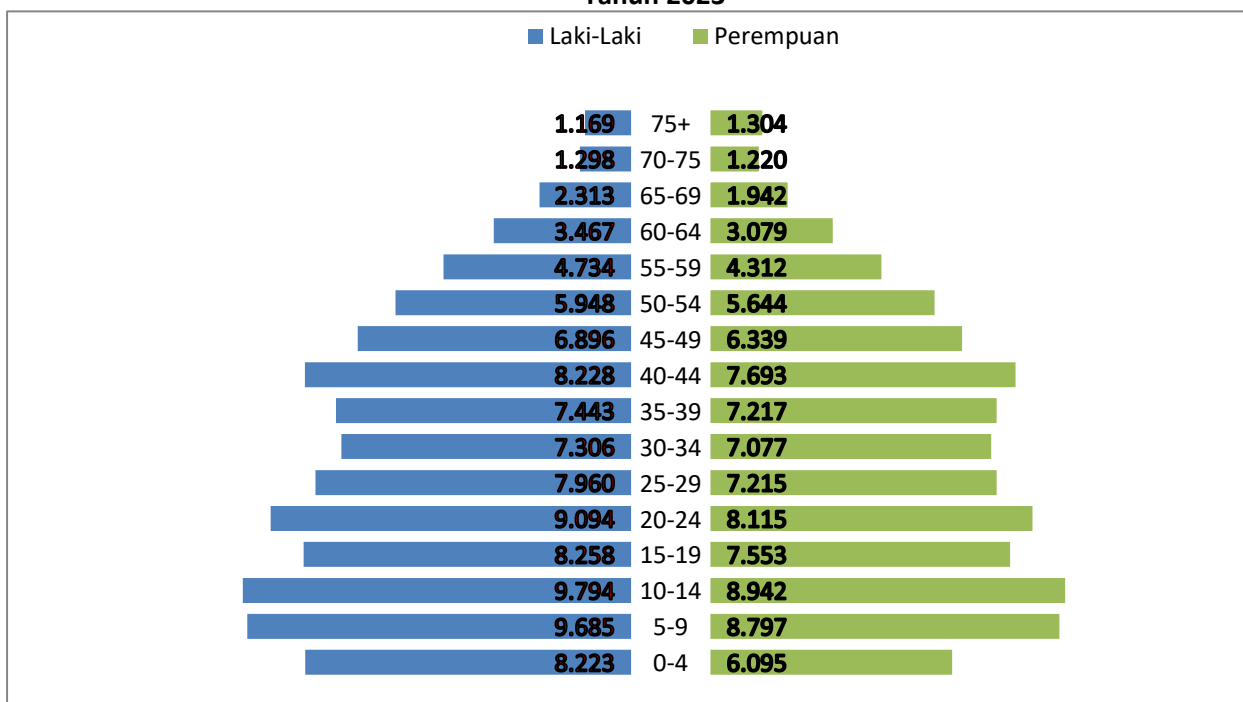


wilayah kecamatan dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km², dapat dilihat pada tabel berikut :

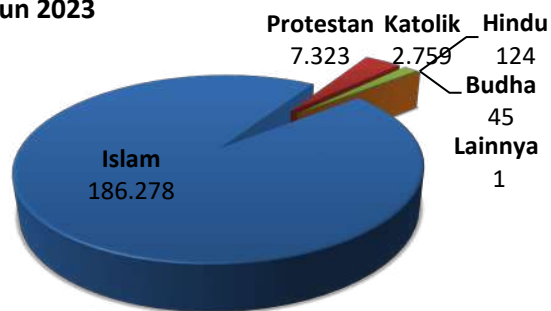
Tabel 1.2 Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (per Km ²)
Penajam	1.207,37	95.358	78,98
Waru	553,88	20.965	37,85
Babulu	399,45	39.921	99,94
Sepaku	1.172,36	40.322	34,39
	3.333,06	3.333,06	58,97

Grafik 1.1 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2023



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,



agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup



15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Kecamatan Penajam
33. Kecamatan Waru
34. Kecamatan Babulu
35. Kecamatan Sepaku

C

Sumber Daya Aparatur

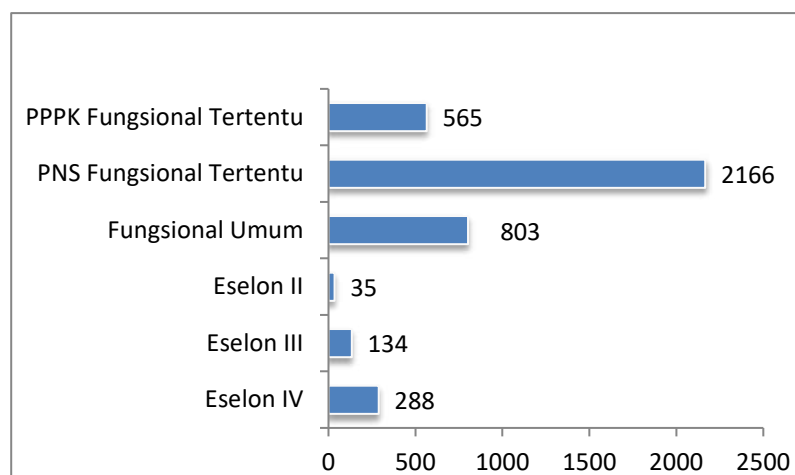
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan

sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 berjumlah 3.991 Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

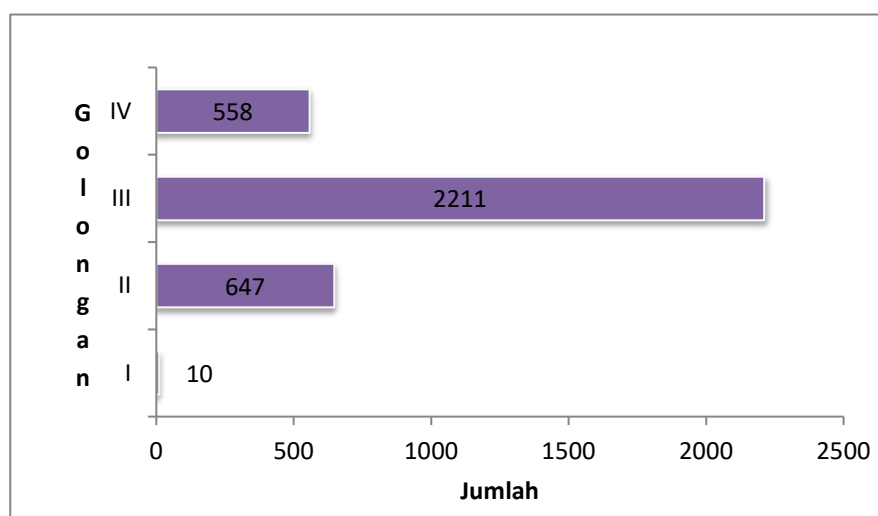
a. Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023



b. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.4 Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023



Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, berikut identifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara 2015 - 2025

Dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan revitalitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi.

3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4) Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem pemasaran.

5) Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu



menyerap tenaga kerja. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan.

6) Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

7) Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.

Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.

8) Mewujudkan jaringan intrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor-sektor ekonomi.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar. Untuk urusan Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar



yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara telah memiliki dokumen SPM yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem informasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem informasi.

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019 – 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7. Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;



8. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi;
10. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

Secara umum permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan dalam permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- ✚ Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ✚ Minimnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium.
- ✚ Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas masih rendah.
- ✚ Kurangnya jumlah dan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga yang layak.

2. Kesehatan

- ✚ Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- ✚ Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- ✚ Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- ✚ Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- ✚ Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
- ✚ Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
- ✚ Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
- ✚ Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
- ✚ Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- ✚ Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
- ✚ Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- ✚ Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- ✚ Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- ✚ Belum ditetapkan peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
- ✚ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- ✚ Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
- ✚ Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
- ✚ Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- ✚ Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.



- ✚ Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
- ✚ Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
- ✚ Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ✚ Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupakan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal.
- ✚ Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- ✚ Infrastruktur penanganan bencana belum memadai.
- ✚ Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum tersentral pada ibukota Kabupaten.
- ✚ Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih.
- ✚ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan.
- ✚ Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai.

6. Sosial

- ✚ Belum tersedianya *database* permasalahan sosial yang komprehensif dan terkini.
- ✚ Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan masih belum maksimal.
- ✚ Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- ✚ Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.
- ✚ Pendataan tenaga kerja sector non formal belum optimal

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ✚ Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.



- ✚ Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal.
- ✚ Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.

3. Pangan

- ✚ Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras.
- ✚ Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya.

4. Lingkungan Hidup

- ✚ Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- ✚ Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan.
- ✚ Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- ✚ Data kependudukan belum akurat dan mutakhir.
- ✚ Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ✚ Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan.
- ✚ Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal.
- ✚ Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- ✚ Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa.
- ✚ Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal.
- ✚ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

7. Perhubungan

- ✚ Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.



- ✚ Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).

8. Komunikasi dan Informatika

- ✚ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
- ✚ *E-government* belum diimplementasikan secara optimal.
- ✚ Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✚ Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.
- ✚ Belum adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan lembaga keuangan (Perbankan).
- ✚ Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.
- ✚ Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.
- ✚ Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.
- ✚ Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi.

10. Penanaman Modal

- ✚ Kurangnya data potensi unggulan daerah.
- ✚ Data potensi penanaman modal belum memadai.
- ✚ Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
- ✚ Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah

11. Kebudayaan dan Pariwisata.

- ✚ Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.
- ✚ Kurangnya promosi objek wisata.



- ✚ Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
- ✚ Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
- ✚ Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.
- ✚ Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat.

12. Perpustakaan

- ✚ Belum optimalnya pemanfaatan peralatan pendukung yang tersedia.
- ✚ Rendahnya minat baca masyarakat.
- ✚ Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- ✚ Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

- ✚ Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan.
- ✚ Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.
- ✚ Keterbatasan tenaga penyuluh.
- ✚ Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pertanian

- ✚ Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
- ✚ Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.
- ✚ Produktivitas peternakan masih belum optimal.
- ✚ Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.

3. Ketahanan Pangan

- ✚ Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya.
- ✚ Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin.



3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Pengawasan

- ✚ Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- ✚ Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap perangkat daerah.

2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- ✚ Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.
- ✚ Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.
- ✚ Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- ✚ Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Keuangan

- ✚ Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.
- ✚ Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian

- ✚ Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.
- ✚ Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- ✚ Pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM jabatan fungsional masih minim.



5. Pemerintahan Umum

- ✚ Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
- ✚ Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan daerah lain dan pihak swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- ✚ Belum optimalnya sistem pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah.

4. Daya Saing

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral dan batubara, minyak bumi dan gas, pertanian, perkebunan, potensi laut, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.

4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.



Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2020-2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2021, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 10,09 triliun dan mencapai Rp 13,19 triliun pada tahun 2022.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

4.2.1 Perhubungan

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan.

Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk transportasi darat, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.243,80 km.

Sedangkan transportasi air, Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu kelotok.

4.2.2 Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas



untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha. Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha. Namun sebagai tindak lanjut pemindahan ibu kota Negara berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, terdapat perubahan RTRW yang saat ini sedang diproses.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapan kawasan industri Buluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan Tahun 2022, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap sebesar 44,5 persen. Ketersediaan bendung Lawe-Lawe yang diharapkan segera rampung sehingga mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah Penajam dan sekitarnya, serta menyuplai kawasan industri Buluminung kedepannya. Surplus energi listrik melalui sambungan Barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampu menarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horisontal selama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2022.



Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayan administrasi terpadu kecamatan (Paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.4.1 Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 6.346 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 191.967, sehingga diperoleh Rasio Lulusan S1/S2/S3 sebesar 3,40 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 339 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Data BPS Provinsi Kalimantan Timur, Rasio Ketergantungan Penduduk Penajam Paser Utara Tahun 2022 sebesar 45,51, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara menanggung 45 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2022 mengalami peningkatan nilai Rasio yang artinya mengalami peningkatan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2021, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 45,25 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 Rasio Ketergantungan 45,51.



4.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan

Dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang dimiliki, Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Sektor yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu bidang budidaya pertanian, budidaya hasil laut dan perikanan, pariwisata dan ecotourism. Selain itu, pengembangan kawasan industri juga dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah.

4.4.2.1 Kawasan Peruntukan Industri

Desain pengembangan kawasan industri direncanakan seluas 5.424 Ha pada Kawasan Industri Buluminung. Dalam perencanaan makro Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KPI Buluminung akan terintegrasi dengan KPI Kariangau di Kota Balikpapan. Jembatan Pulau Balang telah dibangun untuk integrasi Kawasan Peruntukan Industri.

4.4.2.2 Kawasan Pariwisata Bahari

Wisata bahari yaitu kesatuan dari lokasi-lokasi wisata seperti Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Sipakario, dan Pulau Gusung.

4.4.2.3 Kawasan Agropolitan

A. Kawasan Agropolitan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis Pertanian Tanaman Pangan yang termasuk dalam pengembangan sistem perdesaan berada di Kecamatan Babulu yang dipusatkan di Desa Gunung Intan, Babulu Darat, Sebakung Jaya, dan Labangka.

B. Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan

Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun dipusatkan di Babulu Laut Kecamatan Babulu, Desa Api-API Kecamatan Waru, dan di Kelurahan



Nenang Kecamatan Penajam sebagai lokasi pusat pembenihan melalui Balai Benih Ikan.

C. Kawasan Agropolitan Berbasis Peternakan

Kawasan Agropolitan Berbasis Peternakan yang dikembangkan tersebar merata di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pusat Penggemukan Sapi Trunen terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku. Industri pengembangan pembibitan ayam di Desa Tengin Baru.

4.4.2.4 Kawasan Sekitar Jembatan Penyeberangan Penajam – Balikpapan

Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan pada Kelurahan Penajam, Kelurahan Nenang, dan Kelurahan Nipah-Nipah menjadi pintu gerbang dengan Kota Balikpapan.

4.4.2.5 Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (*Crude Central Terminal*) berada di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam

Pembangunan CCT Lawe-Lawe ini dapat mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan, yakni pengembangan kilang “*Refinery Development Master Plan*” (RDMP) Balikpapan dan kilang baru “*Grass Root Refinery*” (GRR) Bontang melalui pipanisasi.

4.4.2.6 Kawasan *Waterfront City*

- 1) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
- 2) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.



3) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.

E

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPJMD sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, di mana Tahun 2023 ini merupakan tahun akhir RPJMD 2018-2023.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2). Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- 4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen resmi sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023. Rencana Kinerja dalam Tahun 2023 berbentuk dokumen resmi yang disusun di awal Tahun 2023, yang merupakan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

A Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang
Maju, Modern, dan Religius”**

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju**
Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan system dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern**
Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius**

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakum dinnukum Waliyadin dan Pancasila.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) misi, yakni:

- 1 *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran*
- 2 *Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu*
- 3 *Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan*
- 4 *Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.*
- 5 *Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan*
- 6 *Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan*
- 7 *Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman*
- 8 *Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.*
- 9 *Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.*
- 10 *Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.*
- 11 *Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.*



Tabel dibawah ini menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1 Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2 Pengurangan angka pengangguran	2 Mengurangi angka pengangguran
2 Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3 Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	3 Meningkatkan investasi di kawasan industri
3 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	4 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		5 Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
		6 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	5 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	7 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
		8 Meningkatkan distribusi pangan
5 Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	9 Meningkatkan daya saing daerah
		10 Meningkatkan kerjasama perekonomian

Misi	Tujuan	Sasaran
6 Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan	7 Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	11 Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
7 Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	8 Memantapkan infrastruktur daerah	12 Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
	9 Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	13 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
	10 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	14 Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
8 Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	11 Optimalisasi PAD	15 Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
9 Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	12 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	16 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
10 Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	13 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	17 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web



Misi	Tujuan	Sasaran
11 Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.	14 Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	18 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	15 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	19 Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

C

Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.



**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang bersaing global	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah
			Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu Strategi	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah
				Perluasan dan penyediaan lapangan kerja
				Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM
				Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial

Misi 2**Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri Buluminung	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah

Misi 3**Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Peningkatan kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya
		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD)
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat propinsi dan Nasional		Peningkatan kualitas tenaga pengajar
				Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa
	Meningkatkan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan lingkungan sehat
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Misi 4

Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan		Pemenuhan air baku irigasi
				Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian
				Pengembangan kualitas petani

Misi 5

Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis, agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa	Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri
		NTP		Penetapan dan pengembangan potensi wisata
		Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif		Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani		Peningkatan kerjasama investasi

Misi 6

Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penanggulang an kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan iklim investasi
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		Peningkatan stimulan UMKM
		Persentase kemiskinan		Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan
				Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES

Misi 7

Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar
		luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)		
		Persentase permukiman yang tertata		Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
		Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Jumlah bangunan/gedung terbangun		Peningkatan pengelolaan lingkungan
		Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan		Penataan ruang daerah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)		
		Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat		
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana		Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak
		Rata-rata waktu respon kejadian bencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan		



Misi 8**Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	Peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah
			Peningkatan potensi sumber-sumber PAD	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD

Misi 9**Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi
				Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan
				Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Misi 10**Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informatika	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa
				Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik
				Penyebarluasan informasi

Misi 11

Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat panajam paser utara yang maju, modern dan religius

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah 2. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

D**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

Tabel 2.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran					
Kebijakan Umum			Program Pembangunan		
1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah. Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah. Perluasan dan penyediaan lapangan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial.		1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	
2			2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.	
3			3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	
4			4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	
5			5	Peningkatan Kesempatan Kerja.	

Misi 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah.	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		2	Program Penataan Struktur Industri.
		3	Program Penataan Kawasan Strategis.
		4	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
		5	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya. Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD). Peningkatan kualitas tenaga pengajar. Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa. Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
		3	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
		4	Program Pendidikan Non Formal.
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
		6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
		7	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
		8	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan.
		9	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
		10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
		12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
		13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
		14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
		16	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
		17	Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga.
		18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
		19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
		20	Program Keluarga Berencana.
		21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
		22	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
		23	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
		24	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas luas

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. 2 Pemenuhan air baku irigasi. 3 Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian. 4 Pengembangan kualitas petani.		1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
		2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
		3	Program Peningkatan Produksi.
		4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
		5	Program Pembangunan Usaha Perkebunan.
		6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
		7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
		8	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
		9	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
		10	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
		11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
		12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
		13	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		14	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan.
		15	Program Pembangunan Taman Laut Penajam.
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Misi 5: Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri. 2 Penetapan dan pengembangan potensi wisata. 3 Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya 4 Peningkatan kerjasama investasi.		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
		3	Program Pengembangan kemitraan pariwisata.
		4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
		5	Program Pengembangan Nilai Budaya.
		6	Program peningkatan kesejahteraan petani.
		7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
		8	Program Produksi Hasi Peternakan.
		9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan Lapangan.
		10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
		11	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan.
		12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
		13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.



Sasaran		Program Pembangunan	
		14	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
		15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
		16	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
		17	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan.
		18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
		19	Program Pengembangan Pengolahan, Diverifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk.
		20	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Misi 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Peningkatan iklim investasi. 2 Peningkatan stimulan UMKM. 3 Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan. 4 Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES.		1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
		2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
		4	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial.
		5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
		7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
		8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
		9	Program Pro-PPK-PPU.
		10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
		11	Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.
		12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Misi 7: Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Peningkatan infrastruktur dasar. 2 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana. 3 Peningkatan pengelolaan lingkungan. 4 Penataan ruang daerah. 5 Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak.		1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
		3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
		5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		7	Program pengendalian banjir



Sasaran		Program Pembangunan	
		8	Program penyediaan dan pengolahan air baku
		9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		10	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		12	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		14	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
		15	Program pengelolaan areal pemakaman
		16	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		17	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		18	Program Pengembangan Perumahan
		19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
		20	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		22	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		23	Program peningkatan pelayanan angkutan
		24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
		25	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		26	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air
		27	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan
		28	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi
		29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		32	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		33	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah
		34	Program perencanaan dan pengembangan Hutan
		35	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		37	Program Perencanaan Tata Ruang
		38	Program Pemanfaatan Ruang
		39	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



Sasaran		Program Pembangunan	
		40	Program Pengendalain Pemanfaatan Ruang
		41	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (peningkatan kasus tanah yang terselesaikan)
		42	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		43	Program Penataan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		44	Pogram Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (terselesaikannya konflik-konflik pertanahan)
		45	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		46	Program Penanggulangan Kebakaran
		47	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan
		48	Program Perlindugnan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
		49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		50	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
		51	Program Pengendalian Penanganan Bencana
		52	Program Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
		53	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
		54	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
		55	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		56	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 8: Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Optimalisasi pendapatan daerah Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD.	1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Misi 9: Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi.	1	Program Pengembangan Data/Informasi.
		2	Program Penataan Administrasi kependudukan.
		3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2	Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan.	4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
		5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.



Sasaran		Program Pembangunan	
3	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
		7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
		8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
		9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
		11	Program Kerjasama Pembangunan.
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
		13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
		14	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
		15	Program Penanganan Bidang hukum.
		16	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
		17	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Misi 10: Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa.	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		2	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
		3	Program Sistem Data Gender dan Anak.
		4	Program Keluarga Berencana.
2	Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik.	5	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia).
		6	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB.
3	Penyebarluasan informasi.	7	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Misi 11: Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah.	1	Program Pembinaan Keagamaan
		2	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba
		3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
		4	Program ketahanan sosial dan ekonomi
2	Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.	5	Program pendidikan politik masyarakat
		6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		7	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak criminal
		8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



Di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai dengan memanfaatkan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,83 ± 1	%
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95	%
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	1.087.500.000	Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,96	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,07	Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,50	Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3	Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	79,70	%
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660	Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	13	%
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94,84	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93.027	Orang
		NTP	105	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	145	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	600	Perizinan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal= 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%
			100	
		Persentase kemiskinan	6,2	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	135,79	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	36,565	Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,90	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	92,05	%
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	25	Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85	%
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 6	Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	80	%
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200	Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	90.930.961.128	Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKJIP)	B	
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	68	Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89	%



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

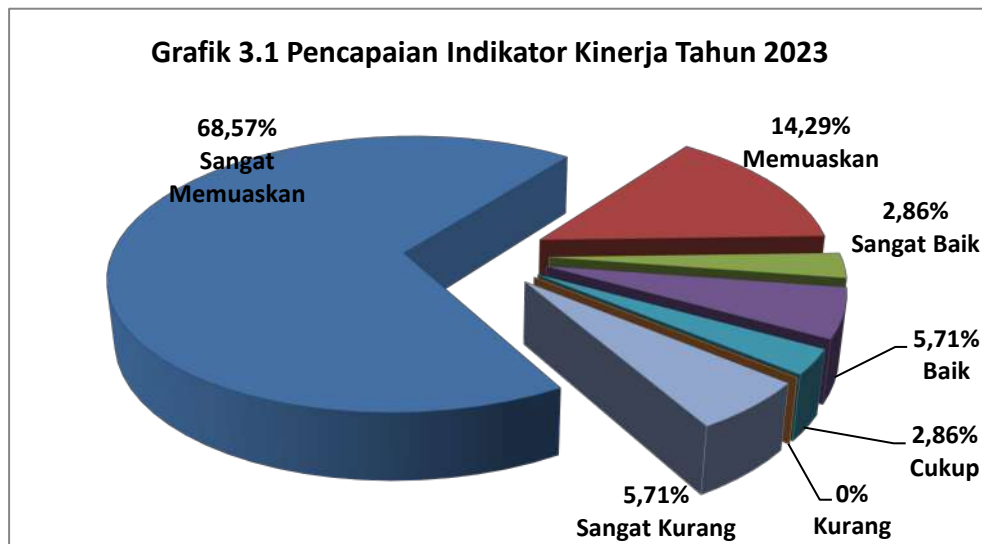
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
> 90 – 100	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	Memuaskan
> 70 – 80	Sangat Baik
> 60 – 70	Baik
> 50 – 60	Cukup
> 30 – 50	Kurang
> 0 – 30	Sangat Kurang

A

Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.



Sumber : OPD Kabupaten Penajam Paser Utara, Data Diolah

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sebanyak 19 sasaran dengan 36 indikator kinerja. Dari 36 indikator kinerja, sebanyak 24 indikator atau 68,57% dalam kriteria **Sangat Memuaskan**, 5 indikator kinerja atau 14,29% masuk dalam kriteria **Memuaskan**, dan 1 indikator kinerja atau 2,86% masuk dalam kriteria **Sangat Baik**, 2 indikator kinerja atau 5,71% **Baik**, 1 indikator kinerja atau 2,86% kriteria **Sangat Baik**, 1 indikator kinerja atau 3,03 kriteria **Baik**, 1 indikator atau 3,03% kriteria **Cukup**, serta 3 indikator kinerja tidak dapat ditampilkan hasil capaiannya.

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2023			
		Target		Realisasi	% Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13 ± 1	%	29,85	953,67
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95	%	2,07	142,51
3	Nilai Investasi	1.087.500.000	Rupiah	906.166.060.000	83,33
4	Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	Tahun	8,53	77,83
5	Harapan Lama Sekolah	15,07	Tahun	12,86	85,34
6	Angka Harapan Hidup	72,50	Tahun	71,83	99,08
7	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3	Medali	99	3.300
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,70	%	50,58	63,46
9	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660	Skor	603	91,36
10	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	13	%	15,25	117,31



No	Indikator Kinerja	2023			
		Target		Realisasi	% Realisasi
11	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94,84	Skor	82,90	87,41
12	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93.027	Orang	440.868	473,91
13	NTP	105	Indeks	-	-
14	Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	145	WUB	195	134,48
15	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	600	Perizinan	3.400	566,67
16	Status Desa	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	Mandiri = 18 Maju = 12 Berkembang = 0 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	900
17	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	Kelurahan, Desa	95	95
		100	%		
18	Persentase kemiskinan	6,2	%	6,97	88,95
19	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	135,79	Km	32,71	24,09
20	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	36,565	Ha	20,05	56,06
21	Persentase pemukiman yang tertata	99,90	%	88	88,09
22	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	200	SPAM	350 SR	175
23	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	3	Unit	3	100
24	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	9	Kejadian	79	11,39
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	Indeks	70,25	95,46
26	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	92,05	%	92,86	100,88
27	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	25	Ha	51,57	206,28
28	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85	%	53,8	63,29
29	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 6	Jam	< 6	100
30	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	80	%	80	100
31	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200	Ha	200	100
32	Peningkatan PAD	90.930.961.128	Rupiah	165.759.155.987,82	182,29
33	Predikat Akuntabilitas (LKJIP)	B		B	100
34	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	68	Aplikasi	72	105,88
35	Kasus/ konflik yang bernuansa agama	0	Kasus	0	100
36	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89	%	100	112,36
Rata - Rata					262,33



SASARAN 1

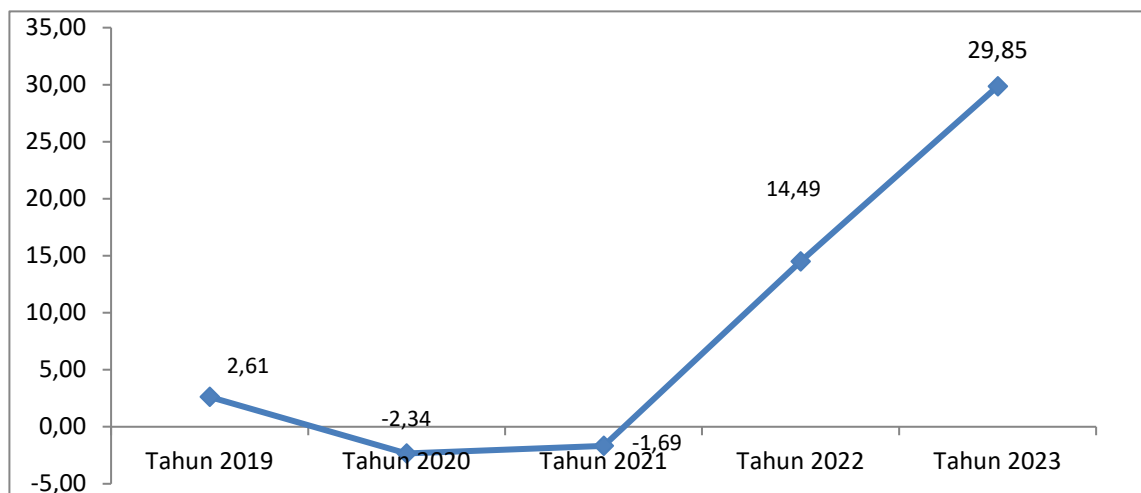
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	14,49 %	3,13±1	29,85	953,67	3,13±1	953,67
Rata-rata Capaian Kinerja					953,67		953,67

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023

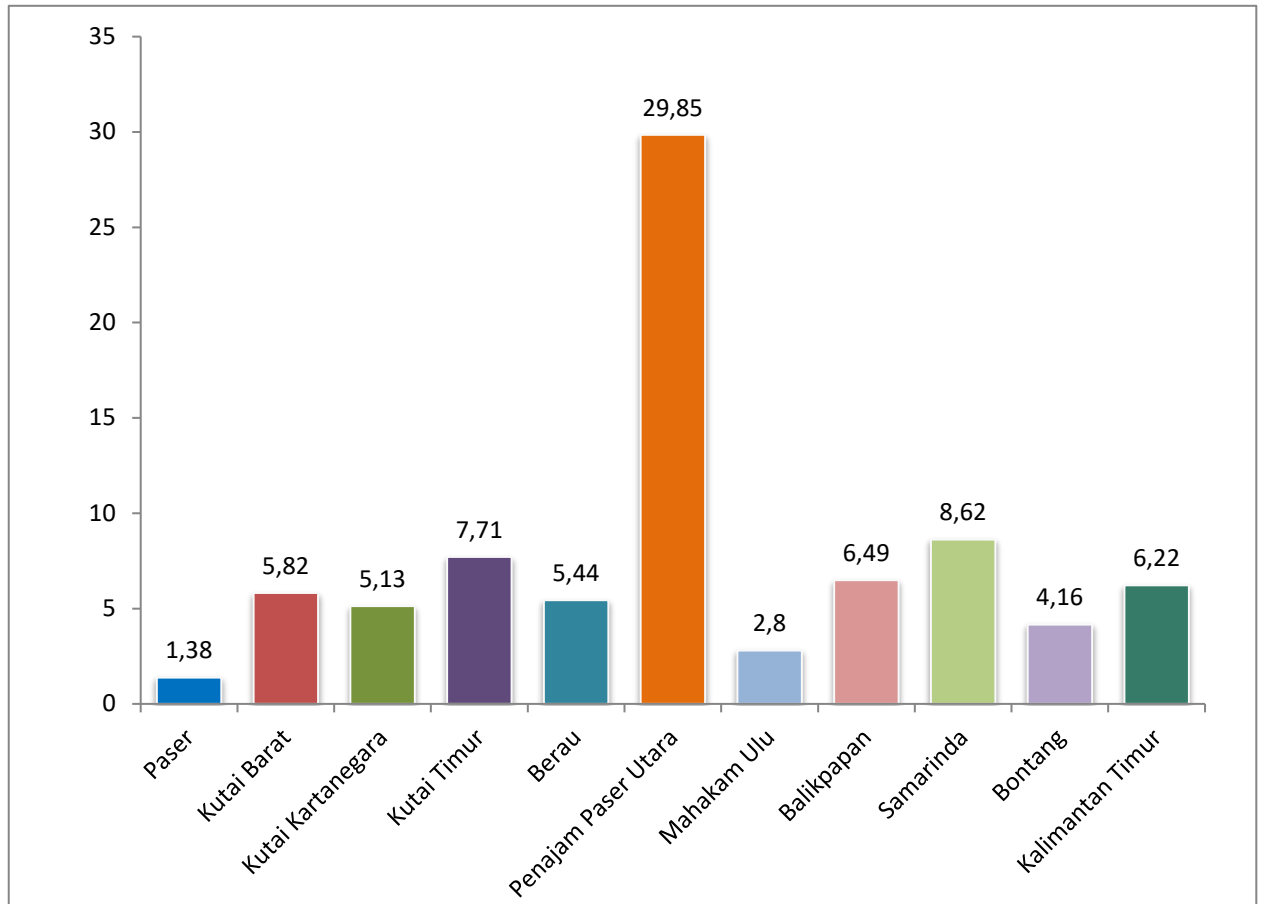


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perbaikan dan peningkatan sejak tahun 2021. Perekonomian Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami penambahan sebesar 15,36 persen dari tahun 2022. Tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu

Konstruksi 110,42; Pengadaan Listrik dan Gas 15,97; Pertambangan dan Penggalian 13,93; Jasa Keuangan dan Asuransi 13,27; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12,33.

Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
4. Program Pengembangan UMKM;
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.





Pasar Penajam



UMKM Penajam



Aktivitas di Pelabuhan
Klotok



SASARAN 2

Pengurangan Angka Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12 %	2,75	2,07	142,51	2,75	142,51
Rata-rata Capaian Kinerja					142,51		142,51

Tingkat Pengangguran Terbuka

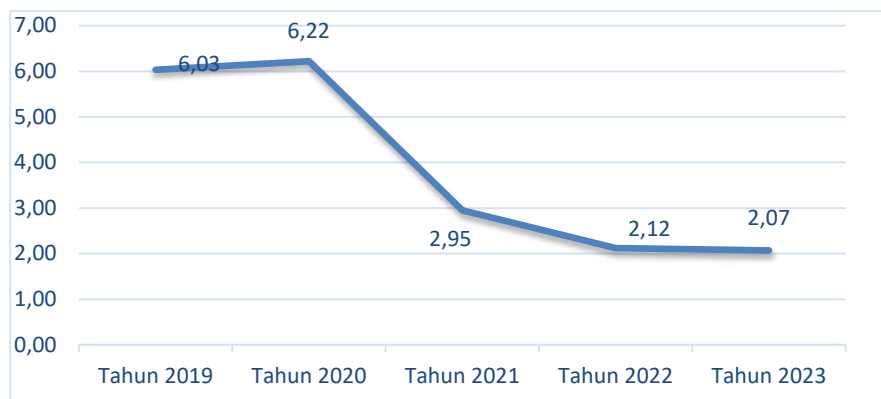
Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu pengangguran. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari jumlah tersebut diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 sebesar 66,30 persen, turun 2,10 persen poin dibanding tahun 2022.

Angkatan kerja di Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 yang bekerja sebanyak 100.497 orang, dan sebanyak 2.128 orang pengangguran. Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 19.955 orang jika dibandingkan Tahun 2022. Jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 19.582 orang dan jumlah pengangguran meningkat sebanyak 3.73 orang.

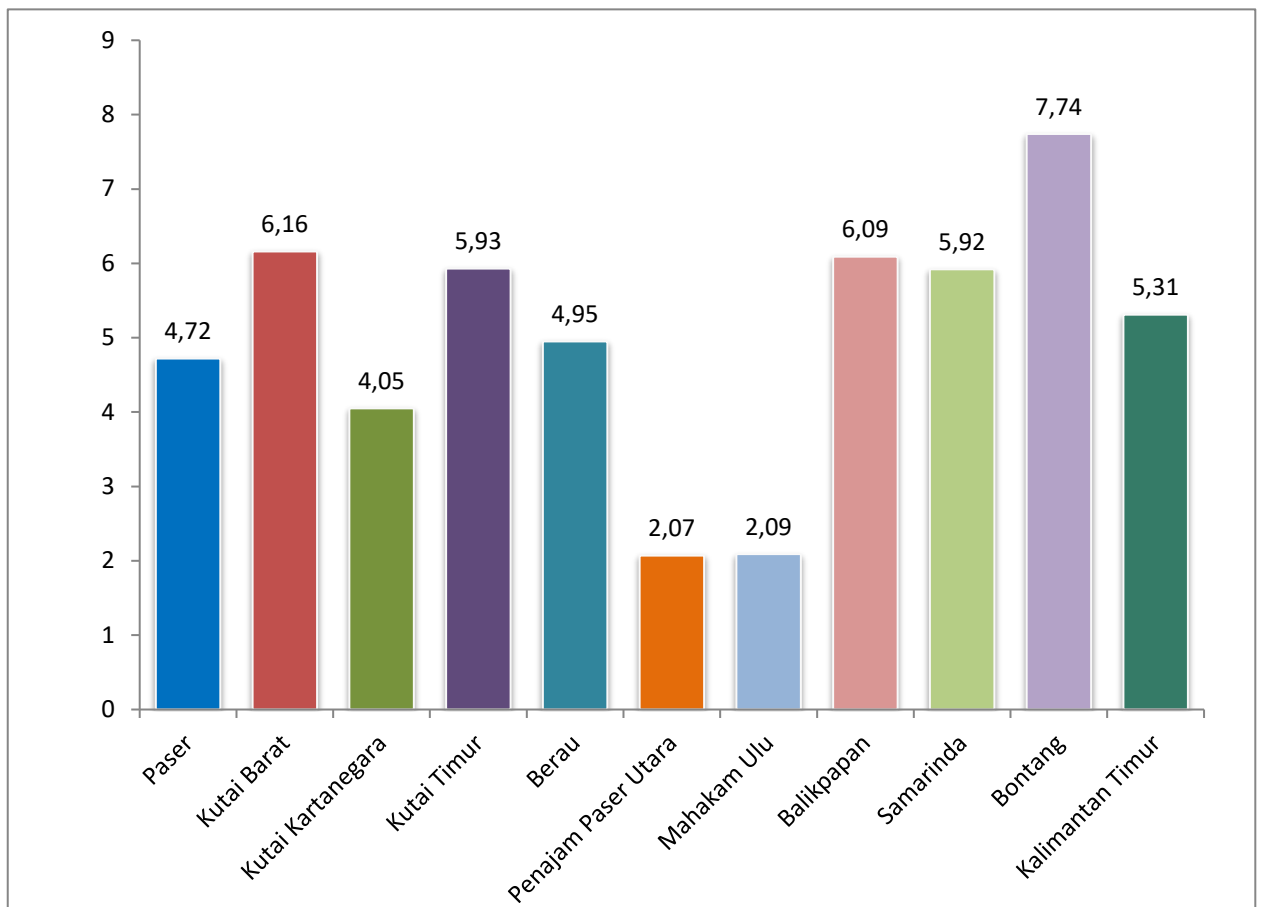
**Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka
Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 sebesar 2,07 persen, terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

**Grafik 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota
Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024



Pendidikan dan Pelatihan untuk tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

a. Mengadakan pelatihan-pelatihan;

Beberapa sektor di perusahaan terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat terisi oleh pencari kerja lokal dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan pelatihan kepada para pencari kerja.

Tabel 3.3 Pelatihan Ketenagakerjaan di Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Peserta
1	PPSDM Migas Cepu	
	Operator pesawat angkat, angkut, dan Juru ikat beban unit foklift	1
	Scaffolding level operator	1
2	BPVP Serang	
	Operator listrik industri	8
	Plate welder GMAW 3G – UP PF'	8
3	BPVP Samarinda	
	Operator exavator	8
	Operator welder	8
4	BLKI Balikpapan	
	Operator forklift	16
	Welder	16
5	UPTD BLKI Paser	
	Security	11
6	UPTD PERIDAKOP Provinsi Kalimantan Timur	
	Mebel kayu rotan	40
	Jumlah	117

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

b. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;

c. Job fair/ bursa kerja;

Melalui kegiatan Job fair/ bursa kerja, dari 913 lowongan kerja yang ada dan perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 36 perusahaan telah menyerap 396 orang dari 632 orang pencari kerja yang melamar.



d. Memperkuat program hubungan industrial dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Dengan melakukan pengesahaan kebijakan terkait perusahaan dan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja melalui mediasi.

e. Sosialisasi penempatan tenaga kerja lokal

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 10,09 persen, dan Pencari Kerja yang ditempatkan sebesar 22,61 persen dari daftar pencari kerja, serta Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan sebesar 100 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Pengurangan Angka Pengangguran”, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial.





Pelatihan Operator
Excavator



Pelatihan Kayu Rotan



Pelatihan Operator
Foklift



SASARAN 3

Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Investasi	1.394.672.997.948 Rupiah	1.087.500.000	906.166.060.000	83,33	450.233.867.774	971,67
Rata-rata Capaian Kinerja					83,33		971,67

Nilai Investasi

Tabel 3.4 Nilai Investasi Tahun 2019 - 2023

Tahun	Nilai Investasi		Jumlah Investasi (Rp)
	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	
Tahun 2019	66.963.000.000	1.007.135.600.000	1.074.098.600.000
Tahun 2020	84.528.000.000	487.048.200.000	571.576.200.000
Tahun 2021	23.400.880.000	404.886.000.000	428.286.880.000
Tahun 2022	141.577.097.948	1.253.095.900.000	1.394.672.997.948
Tahun 2023	54.037.760.000	852.128.300.000	906.166.060.000

Sumber : DPM PTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh sektor kimia dan industri dasar. Nilai Investasi di Tahun 2023 mengalami penurunan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi Investasi PMA pada tahun 2023 sebesar Rp 54.037.760.000,00,- , nilai ini mengalami penurunan pencapaian dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 87.539.337.948,00,- , dan nilai investasi PMDN Tahun 2023 sebesar Rp 852.128.300,00,- nilai ini menunjukkan penurunan nilai investasi PMDN dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 400.967.600.000,00,-. Berkurangnya pencapaian di Tahun 2023 apabila dibandingkan Tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat beberapa berkas/ persyaratan yang belum lengkap;
- Masih belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan investasi

Jika dijumlah realisasi capaian Nilai Investasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah mencapai sebesar Rp 4.946.905.057.948, sehingga persentase capaian Nilai Investasi terhadap target akhir RPJMD (Rp 450.233.867.774) sebesar 971,64 persen, telah melebihi target RPJMD.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan akhir tahun RPJMD antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP untuk mencapai Target kinerja;
- b. Rencana kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan target kinerja;
- c. Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Sementara masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan nilai investasi, antara lain:

- a. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan investasi;
- b. Peluang investasi yang ada belum cukup untuk membuat investor tertarik untuk berinvestasi;
- c. Kurangnya sarana informasi dan promosi investasi.

Solusi kedepan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan sosialisasi atau bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan;
- b. Penerbitan himbauan atau edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- c. Pengawasan berkelanjutan kepada PMA dan PMDN;
- d. Penyusunan dokumen potensi daerah dan kebijakan untuk peningkatan investasi.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri”, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.





Jembatan Pulau Balang
Penghubung Penajam
Paser Utara dengan
Balikpapan



Kawasan Industri
Buluminung



Pembangunan Industri



SASARAN 4

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

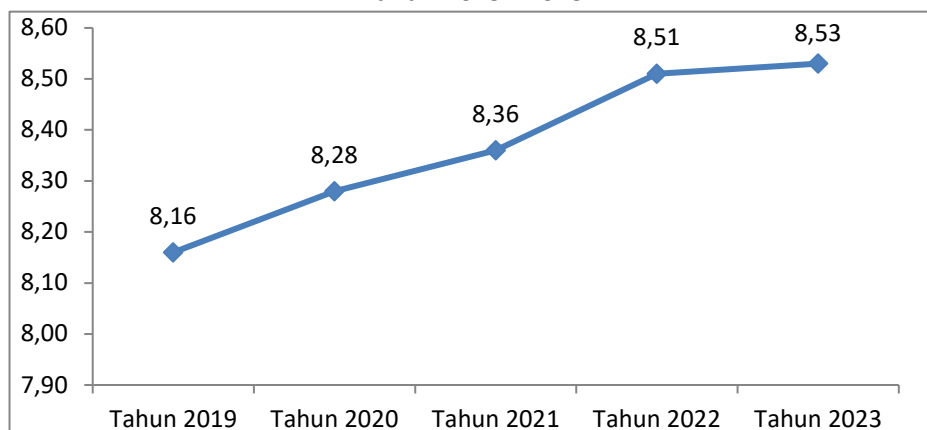
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata lama sekolah	8,51 Tahun	10,96	8,53	77,83	10,96	77,83
2	Harapan Lama Sekolah	12,70 Tahun	15,07	12,86	85,34	12,86	85,34
3	Angka Harapan Hidup	71,71 Tahun	72,50	71,83	99,08	72,50	99,08
Rata-rata Capaian Kinerja					87,42		87,42

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 8,53 tahun masih kurang dari target yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 77,83 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah selama 8,53 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas 3 SMP).

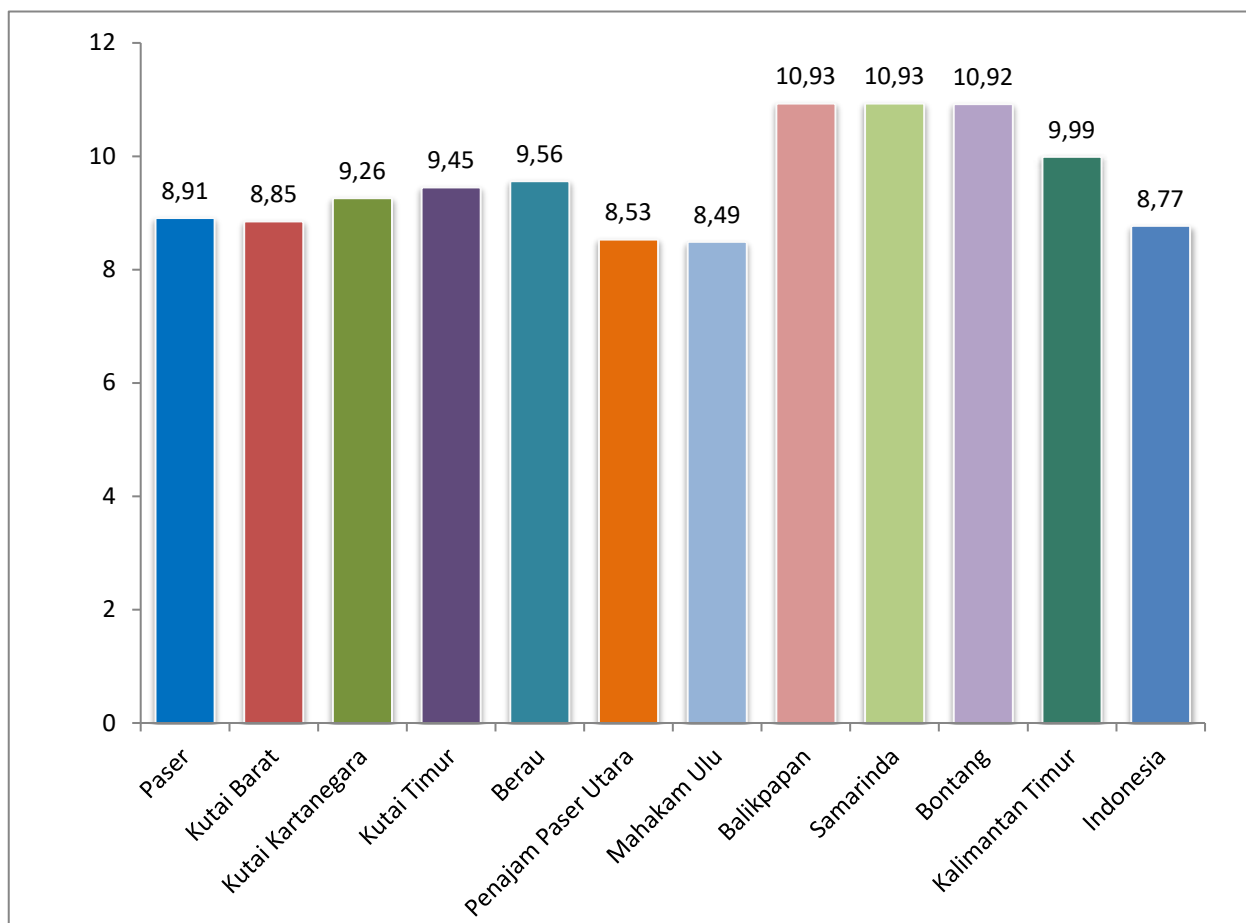
**Grafik 3.6 Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara
Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia (8,77 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur (9,99 tahun), serta berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur. Capaian indikator ini juga belum mencapai target RPJMD 10,96 tahun.

Grafik 3.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Adapun kendala yang ada dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain:

- Sarana dan prasarana belum memadai;
Masih terdapat beberapa sekolah yang masih kekurangan ruang kelas belajar, selain itu masih terdapat sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer dan masih minimnya media pembelajaran.
- Keterbatasan jumlah tenaga pendidik;
Kurangnya tenaga pendidik khususnya pendidik mata pelajaran bahasa Inggris, Olahraga, Mulok bahasa Paser dan guru kelas.
- Keterbatasan penyediaan anggaran.



Kurangnya ketersediaan anggaran untuk sekolah yang peserta didiknya kurang dari 100 orang.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong meningkatnya Rata-rata Lama sekolah adalah antara lain;

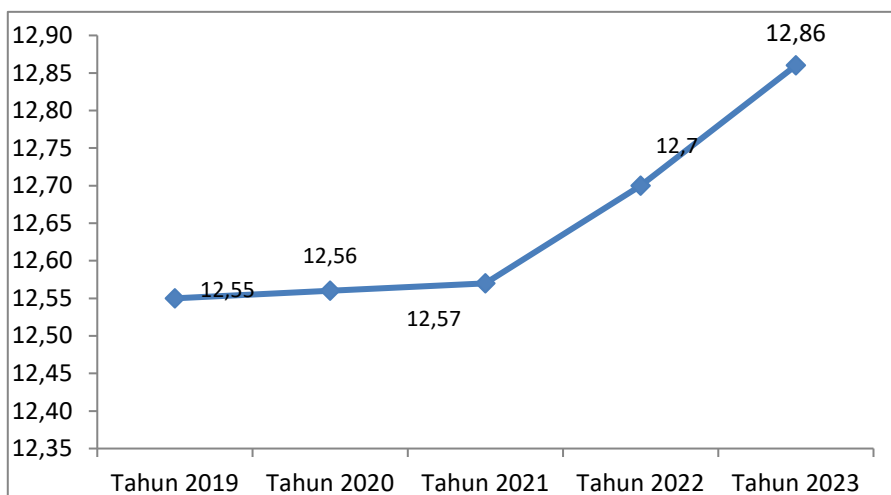
- a. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah;
- b. Memberikan bantuan peralatan sekolah bagi siswa;
- c. Memberikan bea siswa bagi siswa berprestasi;
- d. Memberikan *reward* kepada siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berprestasi;
- e. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah negeri melalui program wajib belajar sembilan tahun untuk mendorong warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusia sekolah untuk bersekolah agar minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya;

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah didapatkan dengan menghitung rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah pada rentang umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur tertentu.

Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 12,86 tahun dari target yang ditetapkan 15,07 tahun dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 85,34 persen.

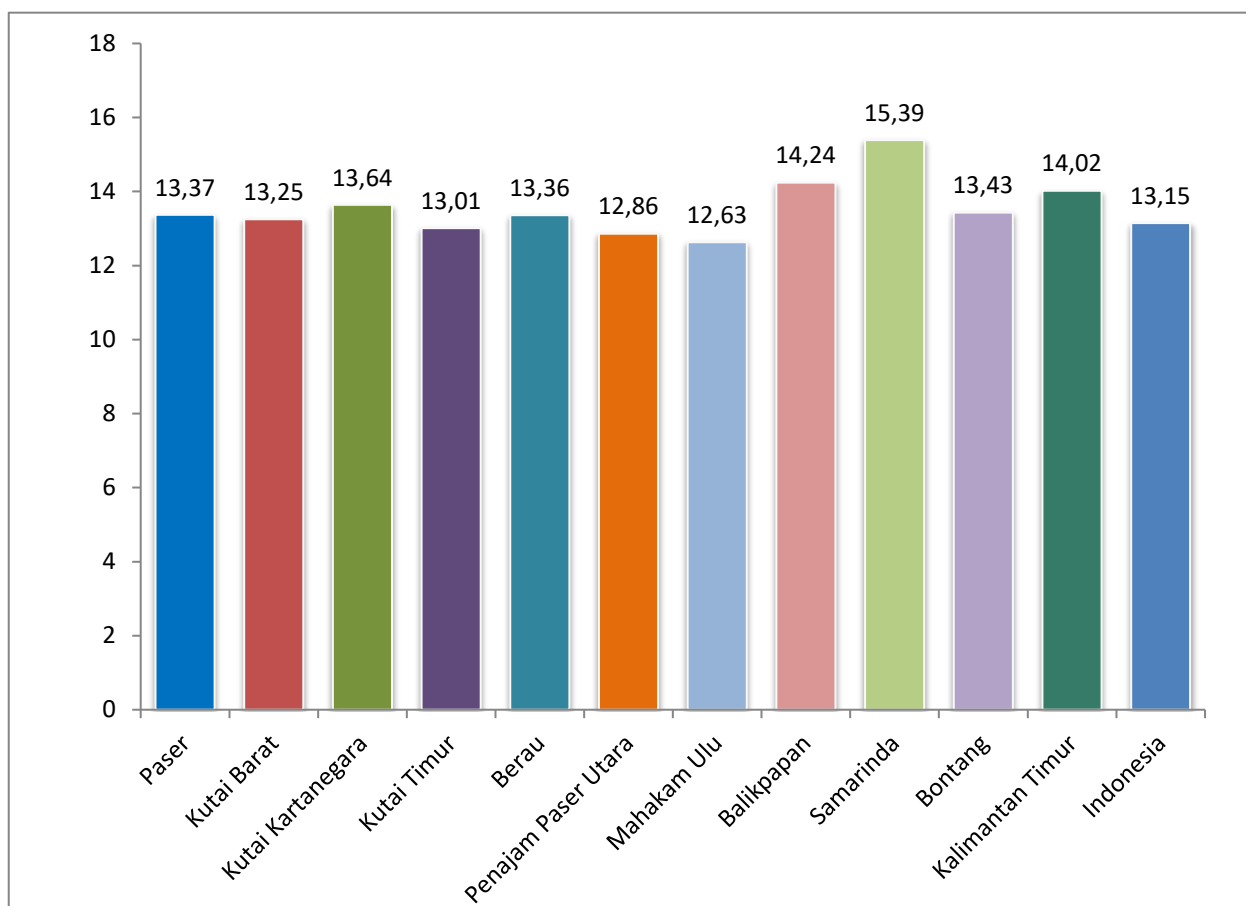
**Grafik 3.8 Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia, serta berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur. Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia tahun 2023 sebesar 13,15 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 14,02 tahun.

Grafik 3.9 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui sosialisasi pendidikan dari tingkat PAUD, memberikan bantuan peralatan pendukung sekolah bagi siswa, beasiswa bagi siswa berprestasi, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP.

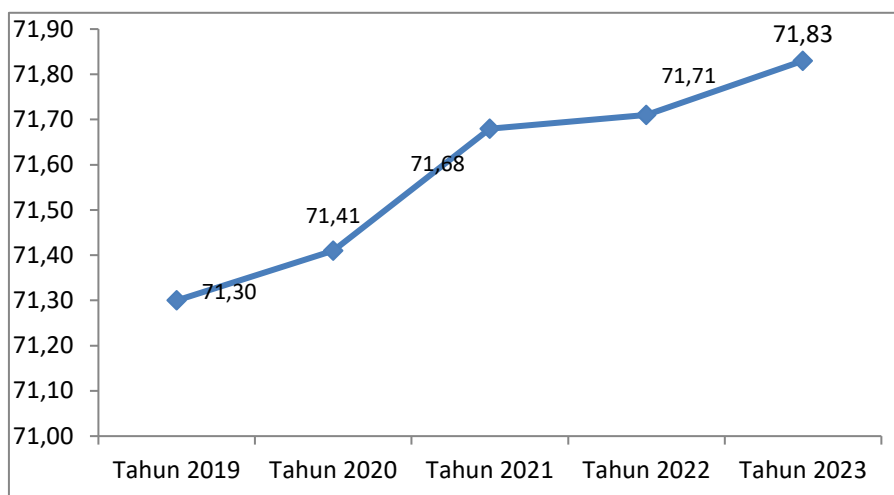
Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pemenuhan ruang kelas belajar terhadap sekolah yang kekurangan ruang kelas belajar dan melengkapi sarana dan prasarana seperti laboratorium dan alat media pembelajaran serta melakukan perekrutan tenaga pendidik.



3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. AHH menjadi suatu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

**Grafik 3.10 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

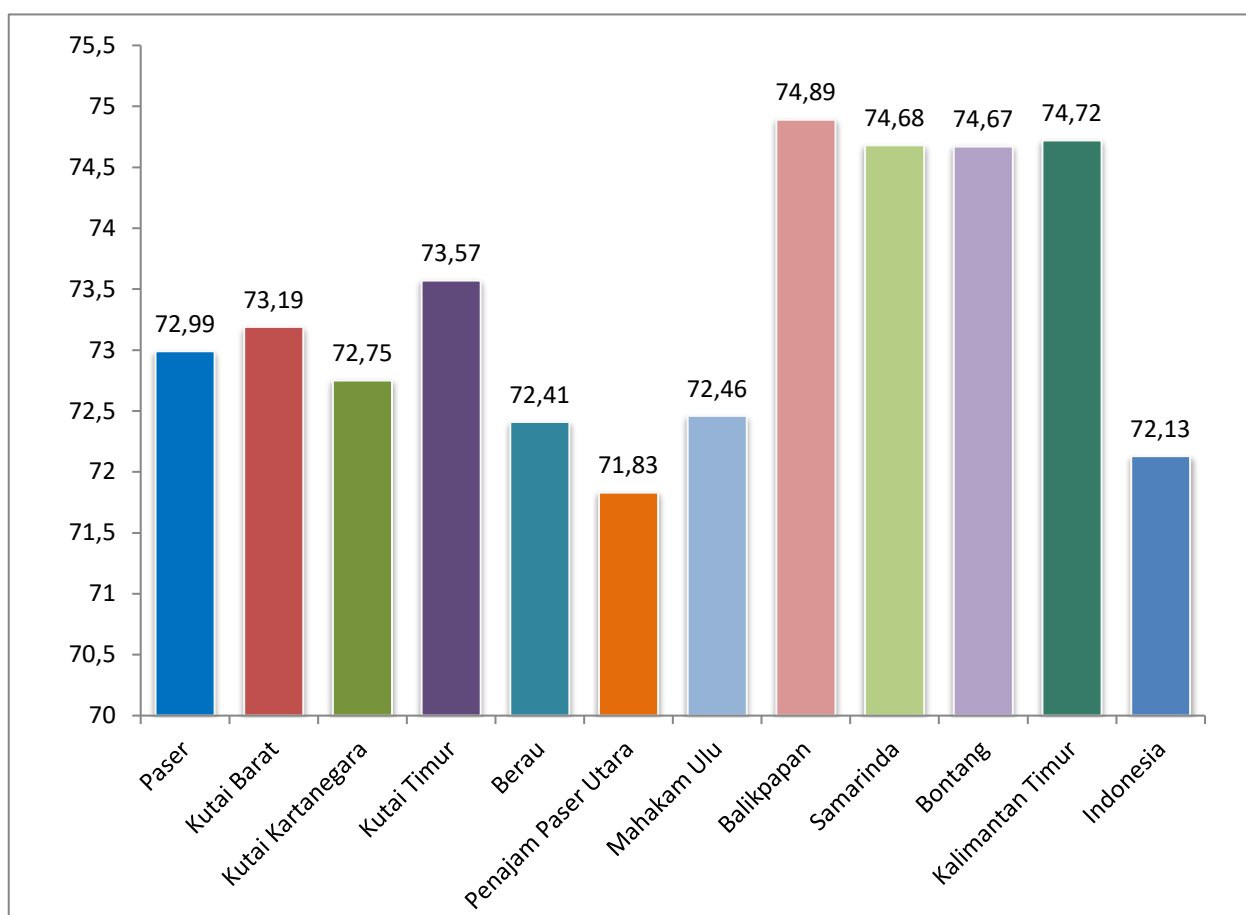
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar 71,83 tahun, mengalami kenaikan 0,12 tahun dari tahun 2022. Interpretasinya dari angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup selama 71,83 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 71,83 tahun pada tahun ke depan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat beberapa tahun terakhir.

Pengukuran Angka Harapan Hidup ini bersumber dari data BPS Tahun 2023. Dari target yang ditetapkan sebesar 72,50 tahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2023 sebesar 71,83 tahun dengan capaian kinerja sebesar 102,11%.

Angka AHH ini masih berada di bawah capaian AHH di Provinsi Kalimantan Timur 74,72 tahun dan berada di bawah capaian AHH Indonesia sebesar 72.13 tahun, serta terendah dari 10 kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur. Tingginya AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan.



**Grafik 3.11 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota
se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

**Tabel 3.5 Sepuluh Besar Penyakit
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**

No.	Nama Penyakit	Jumlah
1	Nasofaringitis akute (Common Cold)	9.390
2	Influenza	3.035
3	Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema)	3.016
4	Hipertensi Primer (esensial)	2.935
5	Dispepsia	2.806
6	Myalgia	2.674
7	Diare dan Gastroenteritis tidak dapat dikelompokkan kedalam A00-A08	2.381
8	Cephalgia	1.975
9	Gasritis	1.861
10	Vulnus	1.857
	Jumlah	31.930

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Jumlah Kematian Ibu sebanyak 2 kematian di Tahun 2023, dan Angka kematian Bayi sebanyak 11 kematian.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”, yaitu :

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.





Peresmian Prasasti
Pembangunan Sekolah
Filial



Peresmian Prasasti
Pembangunan Sekolah
Filial



Peninjauan RSUD Ratu
Aji Putri Botung Penajam



SASARAN 5

Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	151 Medali	3	99	3.300	3	3.300
Rata-rata Capaian Kinerja					3.300		3.300

Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berperan dalam pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di bidang olahraga. Jika kualitas pemuda baik, maka tingkat kualitas hidup juga akan membaik, karena pemuda merupakan penggerak. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan yang sangat baik.

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami perkembangan yang sangat besar, hal ini terlihat dengan diraihnya beberapa medali/penghargaan dari berbagai cabang olahraga.

Pada Tahun 2023, pemuda Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil dan mendapatkan berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2023 adalah 99 medali, dari target yang ditetapkan 3 medali, sehingga capaian kinerja sebesar 3.300 persen.

Adapun perolehan penghargaan terbanyak yaitu pada event olahraga tingkat nasional pada cabang olahraga Taekwondo Inter Student Taekwondo dengan perolehan 9 medali emas, 11 medali perak, dan 4 perunggu. Berkurangnya perolehan jumlah medali di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 dilaksanakan event olahraga POPDA dan POPROV.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dibidang olahraga dengan terus

melakukan upaya pembinaan dan motivasi kepada atlit secara berkesinambungan dan upaya lainnya untuk mendukung prestasi maupun minat pemuda.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda”, yaitu :
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.



Mini Soccer Pelajar SD,
SMP, MTS



Kejuaraan Hockey



SASARAN 6

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49,85 %	79,70	50,85	63,46	79,70	63,46
2	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	502 Skor	660	603	91,36	660	91,36
Rata-rata Capaian Kinerja					77,41		77,41

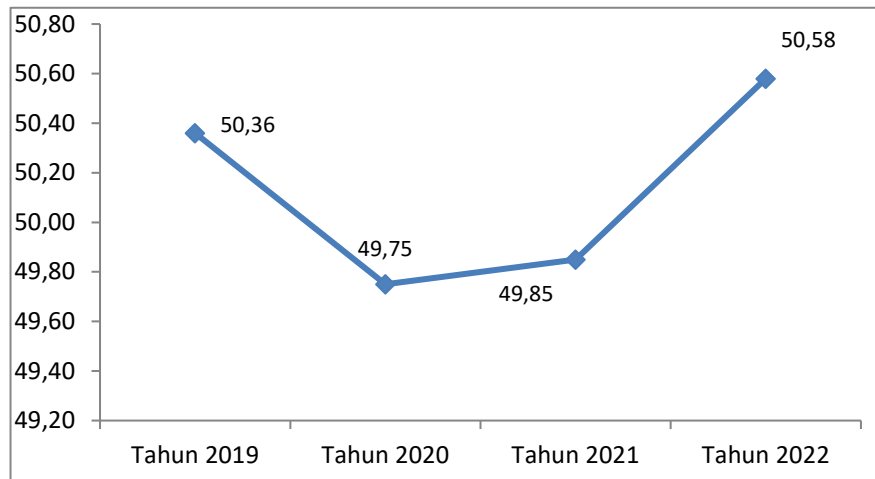
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Variabel yang digunakan dalam pengukuran pemberdayaan gender (*gender empowerment*) adalah:

- Peran perempuan di bidang pengambilan keputusan politik diukur dengan keanggotaan DPR dan DPRD.
- Peran perempuan di bidang ekonomi diukur seberapa banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja profesional, kepemimpinan, teknisi dan ketatalaksanaan atau pekerja terampil.
- Penguasaan sumber daya ekonomi yaitu perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki.

IDG Kabupaten Penajam Paser Utara dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami nilai yang fluktuatif. Pada Tahun 2022 IDG Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan 0,73 dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan capaian IDG ini menandakan bahwa adanya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan peran perempuan ini diharapkan terus meningkat setiap tahun sebagai bukti adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara.

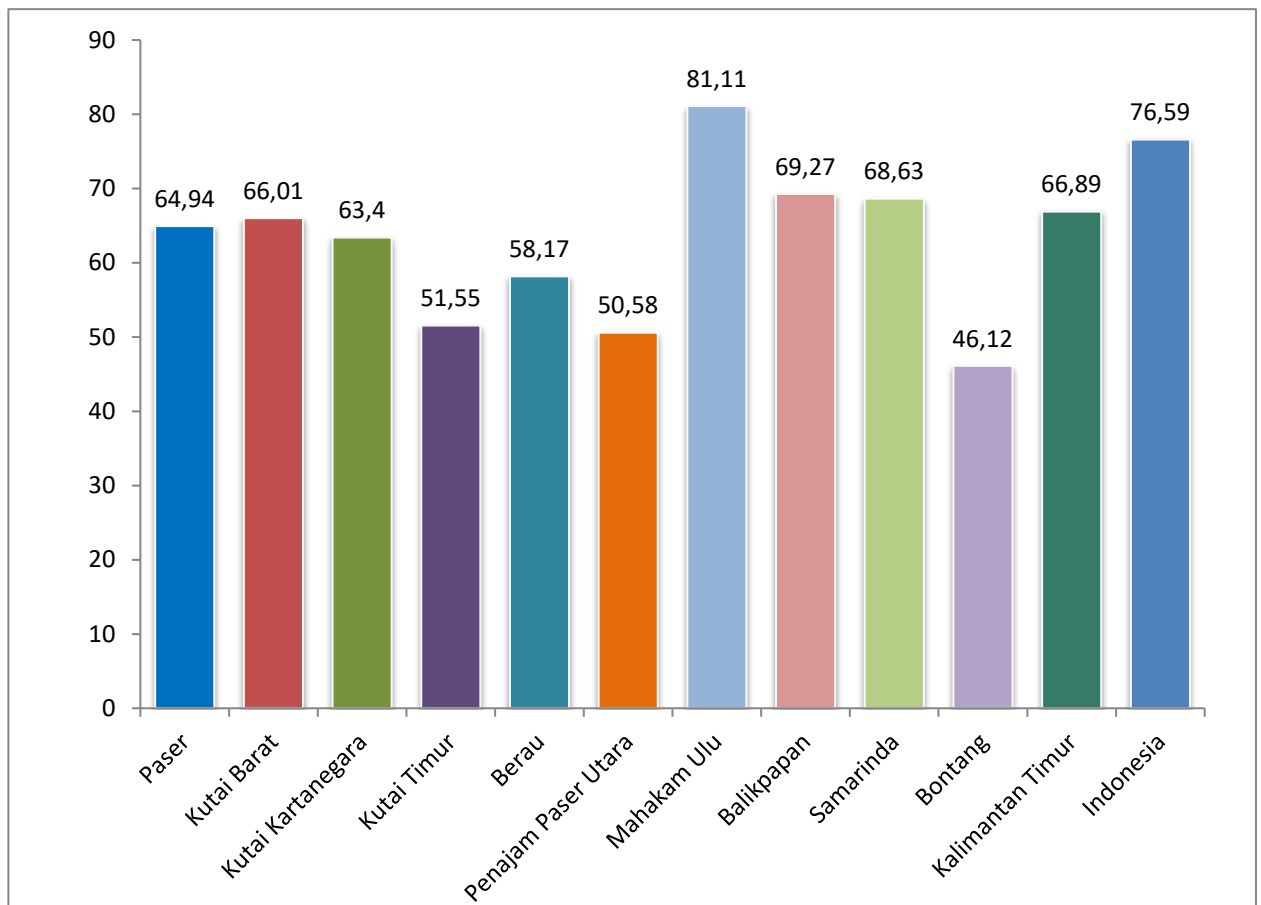
Grafik 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Nilai IDG Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir selalu berada di bawah nilai IDG Provinsi Kalimantan Timur, dimana nilai IDG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 66,89. Hal ini dikarenakan kuota kursi parlemen di DPRD Kabupaten hanya 4 persen dan jumlah tenaga profesional yang menduduki jabatan eselon II sebesar 15 persen.

Grafik 3.13 Indeks Pemberdayaan Gender Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak dan perempuan, dengan mendorong pembangunan manusia berbasis gender, diantaranya :

1. Menciptakan ruang publik yang ramah dan layak anak;
2. Memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menjamin persamaan perlakuan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan;
4. Meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;
5. Meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu bersaing dengan laki-laki;
6. Memperhatikan kebutuhan dasar kodrat bagi perempuan;
7. Memberdayakan peran perempuan dalam memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan ekonomi skala mikro dan kecil;
8. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

2. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

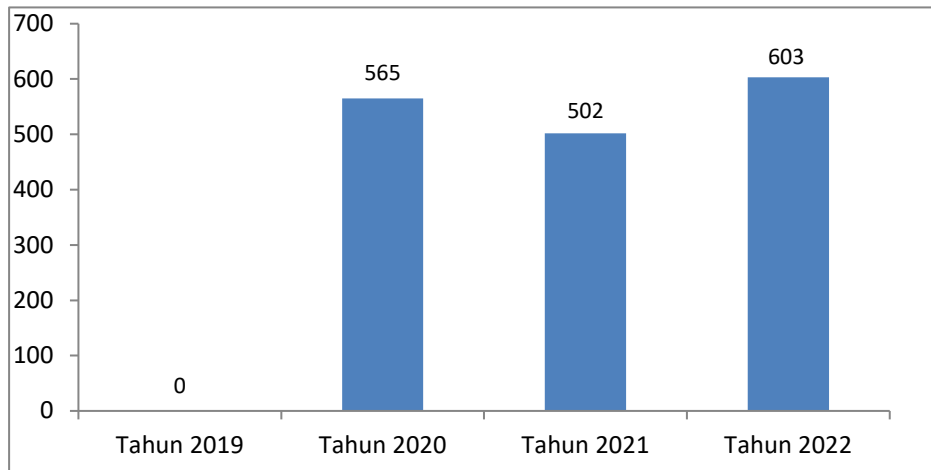
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Tabel 3.6 Kategori Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Berdasarkan Skor

No	Skor	Kategori
1	901- 1000	Kabupaten/ Kota Layak Anak
2	801 – 900	Utama
3	701 – 800	Nindya
4	601 – 700	Madya
5	501 - 600	Pratama



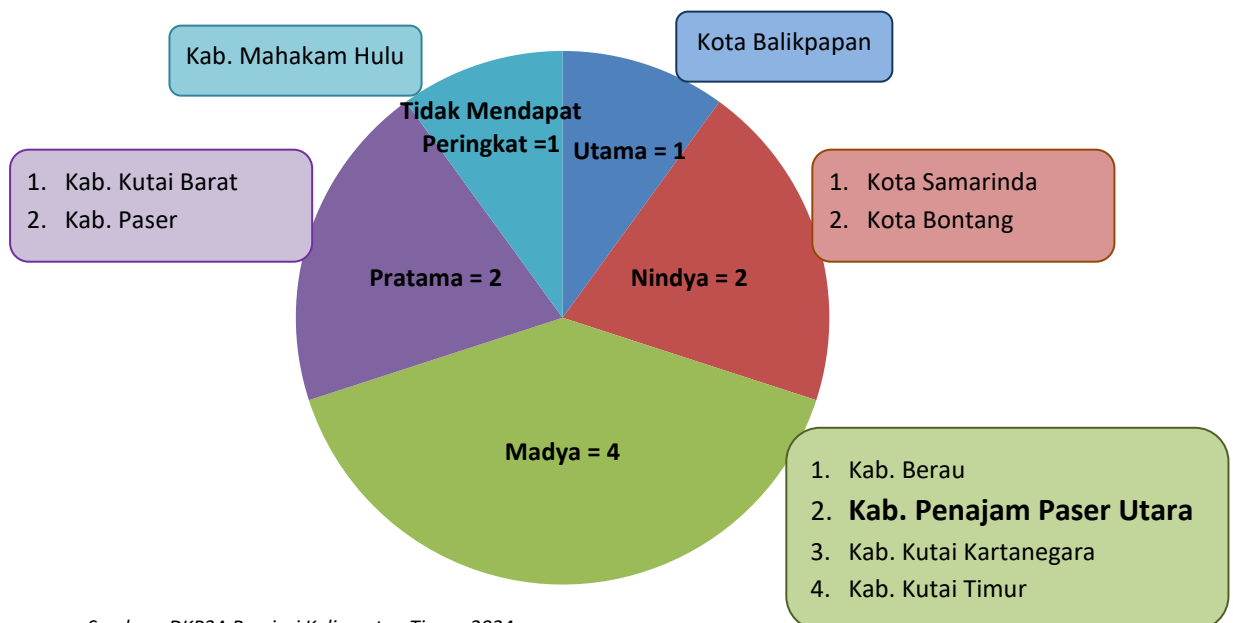
Grafik 3.14 Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2022



Sumber : DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Pada Tahun 2022, skor Kabupaten Layak Anak (KLA) mengalami kenaikan menjadi 603 poin, bertambah 101 poin dari Tahun 2021 dengan peningkatan kategori dari Pratama menjadi Madya. Hal mengindikasikan bahwa penyediaan ruang layak dan ramah anak bertambah kualitasnya.

Grafik 3.15 Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber : DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skor Kabupaten Layak Anak (KLA), antara lain :

- Meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan di infrastruktur publik sehingga layak anak;
- Pelibatan masyarakat, dunia usaha, media dan anak ;



- c. Penegasan peraturan daerah melalui pemberian sanksi bagi dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Melakukan pelatihan konvensi hak anak;
- e. Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.



Taman Bermain di Alun –
Alun Pemerintah
Kabupaten Penajam
Paser Utara



Taman Bermain di
Taman Rozelin
Penajam



SASARAN 7

Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022		2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	22,89	%	13	15,25	117,31	13	117,31
Rata-rata Capaian Kinerja						117,31		117,31

Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB suatu wilayah dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga baik.

Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB menurun jika dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya produksi pertanian di tahun 2023. Jumlah produksi pertanian 2022 sebanyak 54.085 ton berkurang menjadi 42.876 ton di tahun 2022, sedangkan sektor perikanan mengalami peningkatan produksi dari 2.646,42 ton di tahun 2022 menjadi 2.772,15 ton di tahun 2023.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian”, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian;

7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.



Wilayah Persawahan



Kapal nelayan



SASARAN 8

Meningkatkan Distribusi Pangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022		2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	81,80	Skor	94,84	82,90	87,41	94,84	87,41
Rata-rata Capaian Kinerja						87,41		87,41

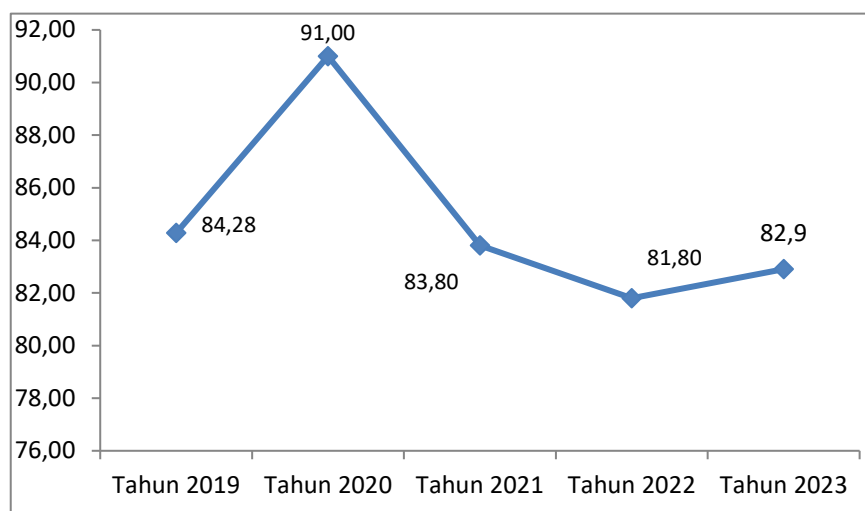
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan kata lain, PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

PPH sebagai indikator kualitas konsumsi pangan digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan wilayah. Status capaian Pola Pangan Harapan (PPH) dapat diklasifikasikan ke dalam kategori "Baik", "Sedang", dan "Kurang" dengan rincian sebagai berikut:

- Kategori "Baik" dengan nilai capaian PPH diatas 90 (skor PPH >90)
- Kategori "Sedang" dengan nilai capaian PPH antara 80-90 (skor PPH 80-90)
- Kategori "Kurang" dengan nilai capaian PPH kurang dari 80 (skor PPH <80)

Grafik 3.16 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, pengembangan keanekaragaman pangan dari sisi konsumsi masyarakat Penajam Paser Utara mengalami peningkatan. Skor PPH dari 81,80 pada tahun 2022 meningkat menjadi 82,90 pada tahun 2023 dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 1.961 Kkal/Kapita per hari. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan ini masih di bawah skor Pola Pangan Harapan nasional 94,1.

Tabel 3.7 Komposisi Konsumsi Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional (WNPG XI, 2018)		Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
		Gram/Kapita/Hari	Kkal/Kapita	% AKG	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	289	1050	50.0	0.5	25.0
2	Umbi-umbian	105	126	6.0	0.5	2.5
3	Pangan Hewani	157	252	12.0	2.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	21	210	10.0	0.5	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	11	63	3.0	0.5	1.0
6	Kacang-kacangan	37	105	5.0	2.0	10.0
7	Gula	31	105	5.0	0.5	2.5
8	Sayur dan Buah	262	126	6.0	5.0	30.0
9	Lain-lain	-	63	3.0	0.0	0.0
Total			2.100	100.0	-	100.0

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023



**Tabel 3.8 Komposisi Pola Pangan Harapan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	283,2	1.085	55,3	51,7	0,5	27,7	25,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	30,5	39	2,0	1,8	0,5	1,0	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	148,1	230	11,7	11,0	2,0	23,5	21,9	24,0	21,9
4	Minyak dan Lemak	35,3	316	16,1	15,0	0,5	8,1	7,5	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,1	12	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang-kacangan	19,1	59	3,0	2,8	2,0	6,0	5,6	10,0	5,6
7	Gula	23,6	86	4,4	4,1	0,5	2,2	2,0	2,5	2,0
8	Sayur dan Buah	211,1	93	4,7	4,4	5,0	23,7	22,1	30,0	22,1
9	Lain-lain	80,6	41	2,1	2,0	-	-	-	-	-
Total			1.961	100,0	93,4		92,4	86,3	100,0	82,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Hasil Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 1.961 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE masih di bawah angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2.100 Kkal per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara masih di bawah angka standar seperti pada jenis pangan umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Energi yang dihasilkan cukup tinggi, namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara belum memenuhi kaidah konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapaiannya skor Pola Pangan Harapan Penajam Paser Utara, yaitu:

- Keterbatasan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun;



- b. Cuaca ekstrim *el nino* mengakibatkan kenaikan harga pangan yang fluktuatif yang mempengaruhi konsumsi bahan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi serta pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang (B2SA) berbasis sumber daya lokal dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.150 Kkal/Kapita/hari.
- d. Kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan siap saji daripada mengkonsumsi pangan lokal;
- e. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan yang bersumber dari beras dan terigu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian skor Pola Pangan, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.150 Kkal/Kapita per hari;
- b. Penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) melalui kompetisi serta penerapan di tingkat rumah tangga;
- c. Penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- d. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal sehingga terpenuhinya karbohidrat yang bersumber dari pangan non beras;
- e. Meningkatkan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara luas di tingkat kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan aneka pangan lokal;
- f. Mengadakan sosialisasi konsumsi pangan dan gizi seimbang.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Distribusi Pangan”, yaitu :

- 1. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.





Festival Pangan Lokal



Pemberdayaan Masyarakat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal



Festival Pangan Lokal



SASARAN 9

Meningkatkan Daya Saing Daerah

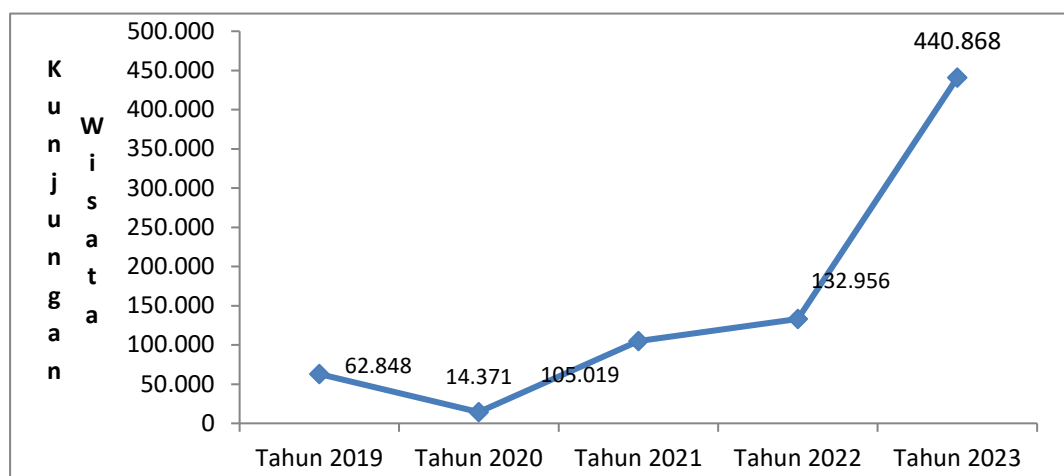
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	132.956 Orang	93.027	440.868	473,91	407.937	169,49
2	NTP	- Indeks	104	-	-	105	-
3	Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	180 WUB	145	195	134,48	300	65,00
Rata-rata Capaian Kinerja					304,20		117,25

1. Tingkat Kunjungan Wisata

Banyaknya tingkat kunjungan wisata memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan masyarakat lokal. Beberapa dampak positifnya yaitu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal.

Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 40 objek wisata yang tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Objek wisata Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh pantai. Beberapa pantai yang terkenal diantaranya adalah Pantai Istana Amal, Pantai Nipah-Nipah, Pantai Saloloang, Pantai Pejala, dan Pantai Corong. Selain pantai, terdapat wisata mangrove di daerah pesisir yang ditumbuhi tanaman bakau, seperti Ekowisata Hutan Mangrove Kampung Baru, serta terdapat wisata fauna, penangkaran rusa di Api-Api.

Grafik 3.17 Kunjungan Wisata Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 440.868 wisatawan, meningkat dari tahun sebelumnya 132.956 wisatawan (meningkat sebesar 231,59%). Target Kunjungan Wisatawan Tahun 2023 sebesar 93.027 wisatawan sehingga tercapai sebesar 473,91 persen. Kunjungan Wisata di Penajam Paser Utara meningkat sejak Tahun 2021 akibat dari menurunnya tingkat pandemi dan adanya objek wisata baru yaitu Pantai Amal, Wisata Sawah Gunung Mulia (D'WISH), dan Alun-Alun Pemkab. Penajam Paser Utara, serta wisata baru lainnya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata yaitu, antara lain:

- a. Mengembangkan tempat yang berpotensi menjadi objek wisata;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap destinasi wisata/ ekonomi kreatif;
- c. Berkolaborasi dengan instansi atau dinas terkait untuk meningkatkan daya tarik wisatawan;
- d. Mengembangkan objek wisata yang ada dan berdaya saing sehingga semakin menarik wisatawan;
- e. Memperluas promosi pariwisata;

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tidak dapat ditampilkan karena tidak adanya kegiatan penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani dari sejak Tahun 2019. Tetapi, jika melihat data Nilai Tukar Petani beberapa tahun sebelumnya, Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 sebesar 108,92 dan biasanya berada di atas Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Tukar Petani Kalimantan Timur Tahun 2019 sebesar 94,8 dan Tahun 2020 sebesar 114,97.

NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami peningkatan dalam hal perdagangan. Kondisi tersebut terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan



terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

3. Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif

Wirausaha Baru (WUB) adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.

Peningkatan Jumlah WUB bertujuan untuk :

- a. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- b. Memeratakan distribusi pendapatan masyarakat;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berkomitmen untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan sektor wirausaha. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya 15 WUB di tahun 2023 dari jumlah WUB di tahun 2022. Pemerintah berupaya menyiapkan masyarakat untuk berwirausaha melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri masyarakat untuk membuka usaha. Menurut data BPS, terdapat 23,96 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai wirausaha.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan WUB yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan sektor lokal unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi melalui pelatihan, dan bimbingan teknis peningkatan kualitas bagi pelaku usaha. Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan yaitu, antara lain:

- a. Pelatihan pengolahan sabut kelapa;
- b. Pelatihan membuat bakery;
- c. Pelatihan sablon;
- d. Pelatihan pengolahan hasil laut;
- e. Pelatihan pengolahan tempurung;
- f. Pelatihan pengolahan pangan
- g. Pelatihan menjahit;
- h. Pelatihan pembuatan tas;
- i. Dan banyak pelatihan-pelatihan lainnya.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, yaitu :

1. Program Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
11. Program Perizinan Usaha Pertanian;
12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Program Pengembangan UMKM.





Festival Budaya
Tradisional Nondoi



Gerakan Panen Padi

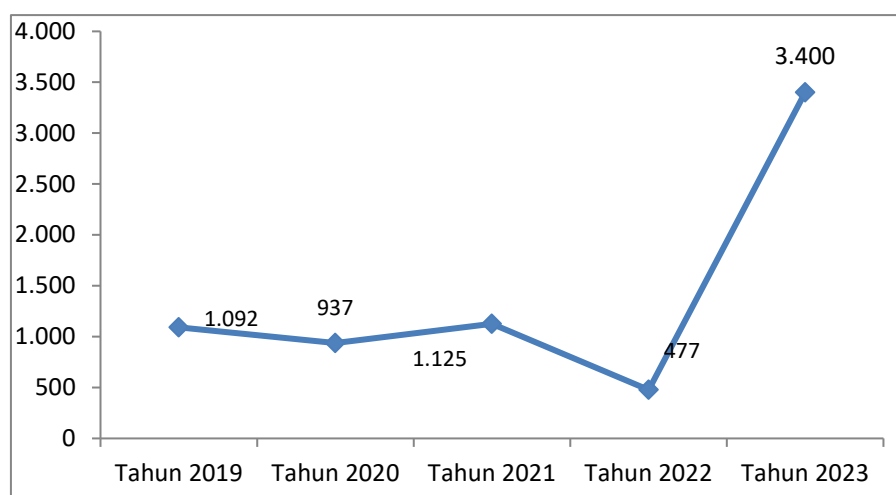


Pelatihan Pembuatan Tas



SASARAN 10**Meningkatkan Kerjasama Perekonomian**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	477 Perizinan	600	3.400	566,67	2.500	281,24
Rata-rata Capaian Kinerja					566,67		281,24

Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani**Grafik 3.18 Jumlah Perizinan yang Tertangani Tahun 2019 - 2023**

Sumber : DPM PTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Jumlah Perizinan yang tertangani di tahun 2023 mencapai 3.400 izin, mengalami peningkatan sebesar 612,79 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat penambahan 2.923 izin di tahun 2023. Sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah perizinan yang tertangani paling banyak di tahun 2023. Jika diakumulasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah perizinan yang tertangani sebanyak 7.031 perizinan, sehingga telah melebihi target akhir RPJMD 2.500 perizinan dengan capaian sebesar 281,24 persen.

Upaya yang dilakukan dan faktor penyebab peningkatan jumlah perizinan yang tertangani di tahun 2023, antara lain yaitu:

- Meningkatnya minat dan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan izinnya;

- b. Terlaksananya layanan “jemput bola” pengurusan izin melalui OSS yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Terlaksananya kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk memfasilitasi pelayanan perizinan bagi masyarakat;
- d. Berjalannya aplikasi SIPESAN guna memudahkan pemohon dalam pengajuan perizinan non OSS.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Kerjasama Perekonomian”, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Promosi Penanaman Modal.



Peninjauan Pelayanan Perijinan



Kawasan Industri Buluminung



SASARAN 11**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Status Desa	Mandiri = 12 Maju = 15 Berkembang = 3 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 18 Maju = 12 Berkembang = 0 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	900	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	900
2	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	85,02 %	100	95	100	100	95
3	Persentase Kemiskinan	7,25 %	6,2	6,97	88,95	6,2	88,95
Rata-rata Capaian Kinerja					362,98		362,98

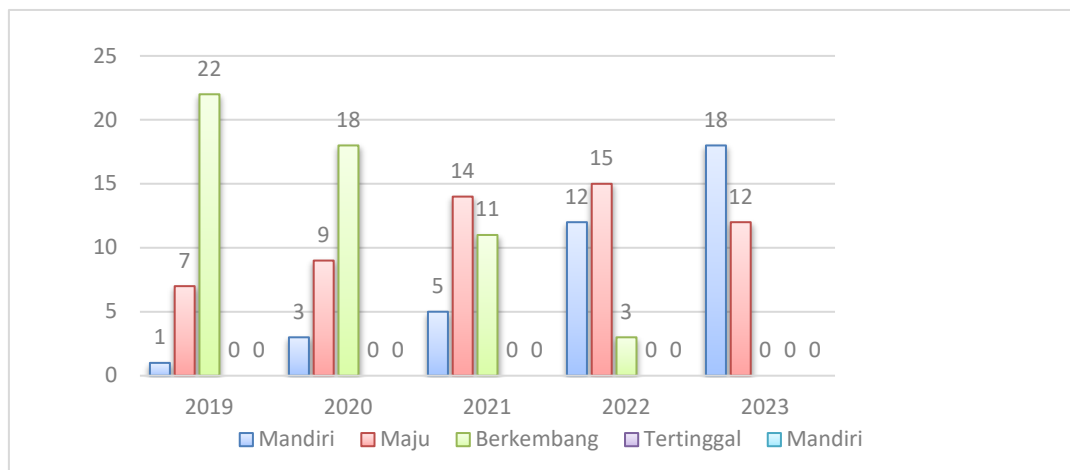
1. Status Desa

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Dalam perkembangan pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 30 desa dari jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Tahun 2023 terdapat 18 Desa Mandiri dan 12 Desa Maju. Terjadi peningkatan status 6 desa berkembang menjadi desa mandiri di tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan desanya.

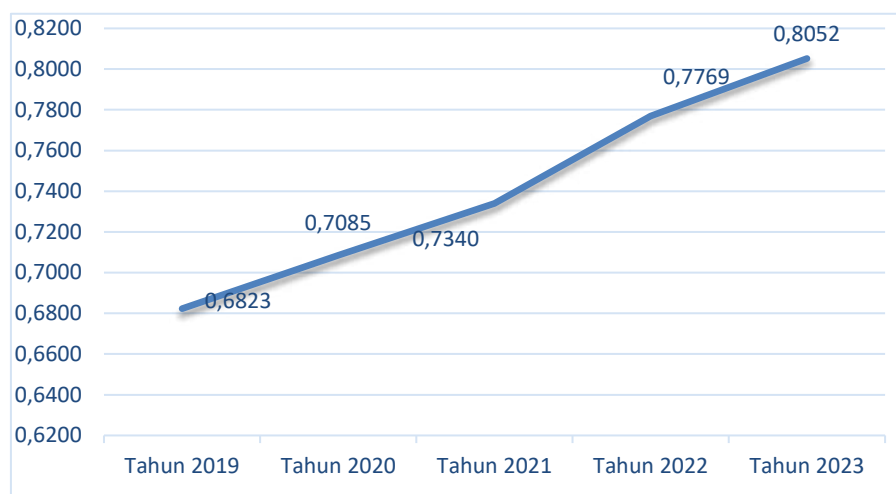
**Grafik 3.19 Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Peningkatan status desa seiring dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), dimana tahun 2023 Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi 0,8052 yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar 0,7769. Status klasifikasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah Maju atau disebut Desa Pra-Sembada yang berarti memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.. Indeks Desa Membangun merupakan gambaran secara keseluruhan gambaran pembangunan di desa yang adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan.

**Grafik 3.20 Indeks Desa Membangun
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2024

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara baik dan transparan.
- b. Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendampingan P3MD.
- c. Adanya Program Pro P2KPM yang merekrut para pendamping teknis dalam meningkatkan pembangunan desa dan bantuan keuangan pemerintah daerah untuk pelatihan-pelatihan demi meningkatkan keterampilan masyarakat.

2. Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa menunjukkan komitmen dalam membangun infrastruktur daerah Penajam Paser Utara dengan mengaplikasikan berbagai ide inovasi sebagai percepatan pembangunan infrastruktur demi tersedianya pelayanan publik yang memadai. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Tahun 2013 mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan kendala infrastuktur di desa dan kelurahan sehingga mempersingkat jalur birokrasi yang panjang.

Tahun 2023 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan dari Tahun 2022, meningkat 10 persen. Target Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan belum tercapai 100 persen. Hal ini dikarenakan tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (UPT. PU) fokus pada pembangunan jalan dan rehabilitasi jalan.

Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk peningkatan kinerja, antara lain yaitu:

- a. Koordinasi yang intens antar SKPD terutama terkait kegiatan yang beririsan dengan DPUPR;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan;
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan.



3. Persentase Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

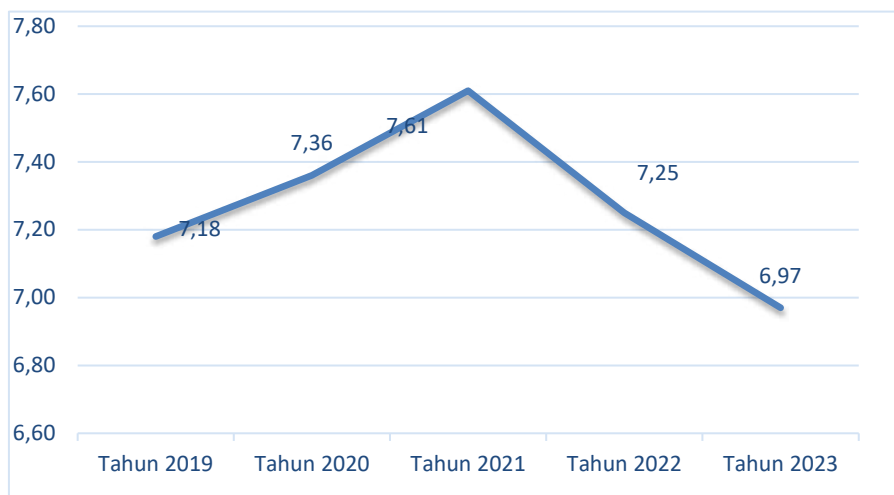
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 sebesar 11.190 (6,97 persen), sedangkan pada tahun 2022 sebesar 11.590 (7,25 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebanyak 400 jiwa atau 0,28 persen penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara dibanding tahun 2022.

**Tabel 3.9 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	466.918	11.520	7,18
2020	488.807	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25
2023	583.239	11.190	6,97

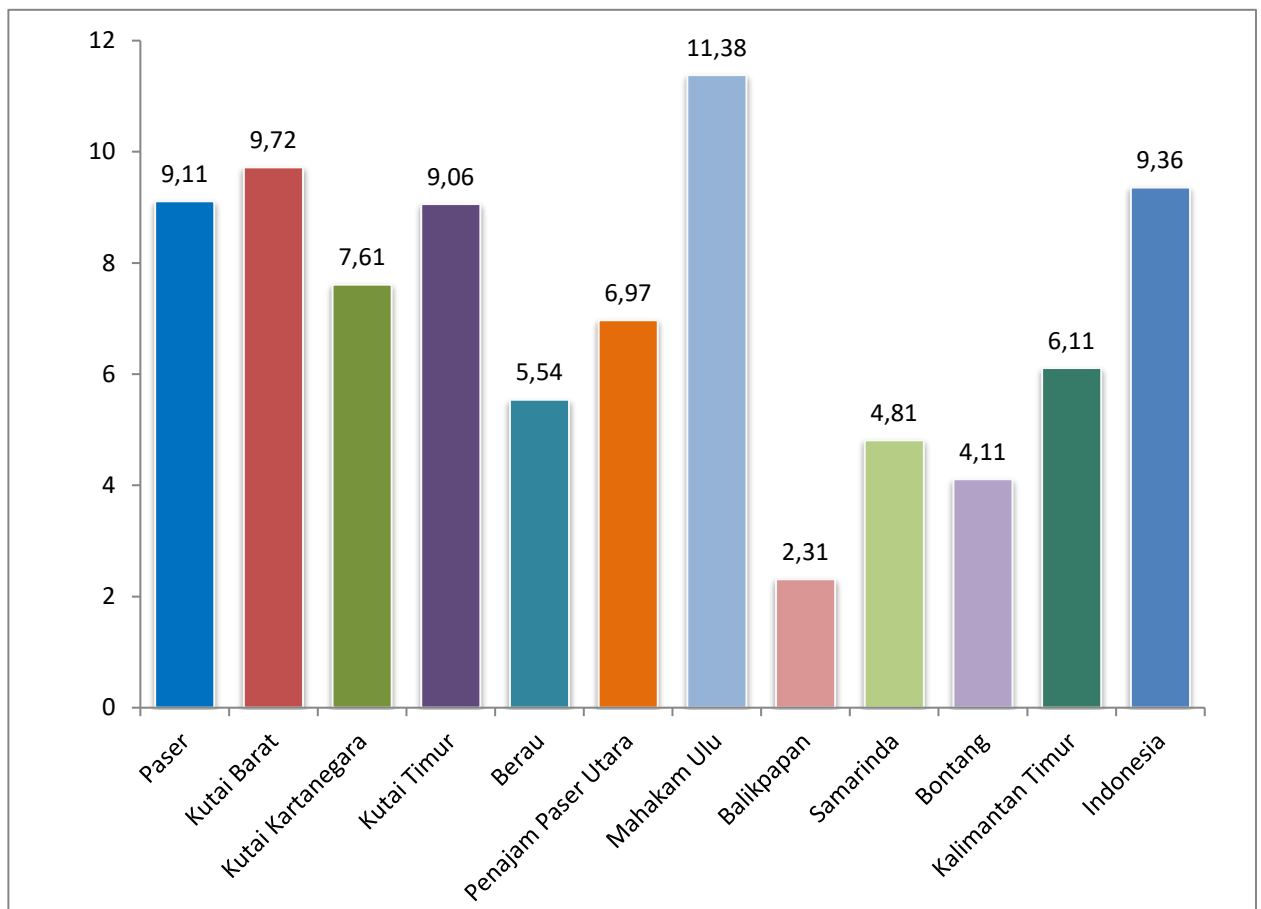
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

**Grafik 3.21 Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara
Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Grafik 3.22 Persentase Kemiskinan Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-5 dengan Persentase Kemiskinan terendah dibanding dengan 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan Persentase Kemiskinannya masih di atas Persentase Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, serta berada di bawah Persentase Kemiskinan Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase kemiskinan, antara lain yaitu:

- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Pemberian bantuan oleh pemerintah melalui program perlindungan sosial;
- Menstabilisasi harga;
- Meningkatkan program desa mandiri; dan
- Memperluas lapangan pekerjaan.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan”, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Program Pengembangan Permukiman;
8. Program Pengembangan Perumahan;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
11. Program Perekonomian dan Pembangunan.





Budidaya Udang



Peningkatan Jalan Desa



Gambar Wilayah Sekitar
Pelabuhan Penajam



SASARAN 12**Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022		2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	69,41	Km	135,79	32,71	24,09	1.206,06	62,39
2	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	110	Ha	36,565	20,5	56,06	152,330	119,70
3	Persentase pemukiman yang tertata	19,94	%	99,90	88,00	88,09	99,90	88,09
4	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	4 2.016	SPAM SR	200 SR	2.342 SR	1.171,00	1.310	1.158,09
5	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	0	Unit	3	3	100	17	94,12
6	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	82	Kejadian	9	79	11,39	46	16,03
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,1	Indeks	73,59	70,25	95,46	75,65	92,86
Rata-rata Capaian Kinerja						220,87		233,04

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap

Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 tercatat sepanjang 1.241,03 km, dimana jalan negara sepanjang 58,5 km, jalan provinsi sepanjang 89 km, dan jalan kabupaten/ kota sepanjang 1.224,03 km. Pada tahun 2022, 439,20 km jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam kondisi baik, 471,78 km dalam kondisi sedang sementara 227,52 km rusak dan 102,80 rusak berat.



Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 terealisasi sepanjang 32,71 Km, tercapai 24,09 persen dari yang ditargetkan. Tidak tercapainya indikator kinerja ini

disebabkan oleh produk akhir yang digunakan dalam kegiatan rekonstruksi jalan adalah rigid beton yang memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan aspal.

2. Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, pemerintah kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola saluran tersier.

Tahun 2023 Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa seluas 20,5 Ha. Dari yang ditargetkan 36,565 tercapai sebesar 56,06 persen. Hal ini disebabkan bahwa di tahun 2023 kegiatan fokus pada pemeliharaan dan pembersihan jaringan irigasi permukaan. Jumlah Luas Area Daerah Irigasi sampai dengan tahun 2023 seluas 182,35 Ha, telah melebihi target akhir RPJMD.



Pembangunan Irigasi

3. Persentase Pemukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.



Berdasarkan RTRW Kab. PPU No. 3 Th 2014 Luas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan adalah Sebesar 13.292 Ha. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan 99,90 persen untuk indikator Persentase Pemukiman yang Tertata, terealisasi adalah 88,00 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 88,09



persen. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2023 yaitu penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman, dan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 22 unit rumah.

Strategi yang dapat dilakukan dalam penataan permukiman adalah dengan konsep *Collective Housing*, antara lain yaitu:

a. Perbaikan fisik kawasan

Perbaikan lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas, namun tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal.

b. Penataan tata letak kawasan

Dilakukan melalui penataan ulang pada tata letak rumah dan jalan.

c. Pembangunan kembali

Pembangunan kembali kawasan di atas lahan yang sama.

d. Pembagian lahan

Kesepakatan dengan pemilik lahan dan masyarakat agar mau berbagi lahannya untuk kebermanfaatan bersama.

e. Pemindahan menuju lokasi baru

Memberikan tempat yang baru bagi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman yang status lahannya ilegal atau bermukim di lingkungan rawan bencana.



4. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara terus berupaya untuk memperluas jangkauan sambungan air minum perpipaan, sehingga kebutuhan konsumsi air dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Pada tahun 2019 jumlah SPAM yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 10 SPAM, namun sampai dengan tahun 2023 terdapat 6 SPAM yang masih berfungsi yaitu 5 SPAM di Kecamatan Babulu dan 1 SPAM di Kecamatan Sepaku.

**Tabel 3.10 Capaian SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023**

Kecamatan	Target (KK)	Terlayani Jaringan Perpipaan (KK)	Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan	Belum Telayani (KK)
Babulu	12.843	534	3.883	8.426 (65,61%)
Waru	6.642	1.521	896	4.225 (63,61%)
Penajam	30.439	10.766	13.485	6.188 (20,33%)
Sepaku	13.302	2.350	10.588	362 (2,72%)
Total	63.226	15.171	28.852	19.201 (30,37%)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024



Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target tahun 2023 dan target kondisi akhir RPJMD telah tercapai jauh melebihi yang ditargetkan, namun di tahun 2023 masih terdapat 19.201 KK atau 30,37 persen dari kebutuhan Sambungan Rumah SPAM belum terlayani.

Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk pengembangan SPAM agar kebutuhan akses air minum yang layak dapat terpenuhi, antara lain yaitu:

- a. Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya;
- b. Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
- c. Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan;
- d. Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas;
- e. Koordinasi penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik;
- f. Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
- g. Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan; serta
- h. Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.

5. Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun

Pembangunan gedung kantor pemerintahan yang memadai dan representatif bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Salah satu permasalahan sarana pelayanan pemerintahan di Kabupaten



Penajam Paser Utara yaitu belum terpenuhinya seluruh ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.

Pada Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) pembangunan gedung pemerintahan, yang merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini kebutuhan gedung kantor sebanyak 65 unit, sudah terbangun 36 unit, sehingga masih dibutuhkan 29 unit gedung kantor pemerintahan.

6. Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan

Angka kecelakaan darat di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 79 kejadian di tahun 2023. Jumlah kecelakaan ini menurun 3 kejadian jika dibanding dengan tahun 2022. Target Angka Kecelakaan Darat dan Perairan 9 kejadian belum tercapai, dan hanya terealisasi 11,39 persen. Tingginya Angka Kecelakaan Darat pada umumnya disebabkan oleh faktor kelalaian pengguna jalan, faktor kondisi jalan yang kurang baik, faktor kendaraan, fasilitas keselamatan jalan, dan faktor kondisi alam. Koordinasi antar lintas sektoral perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan infrastruktur jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan penindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi Angka Kecelakaan Darat, antara lain:

- a. Pengaturan lalu lintas jalan secara rutin;
- b. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- c. Pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ);
- d. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

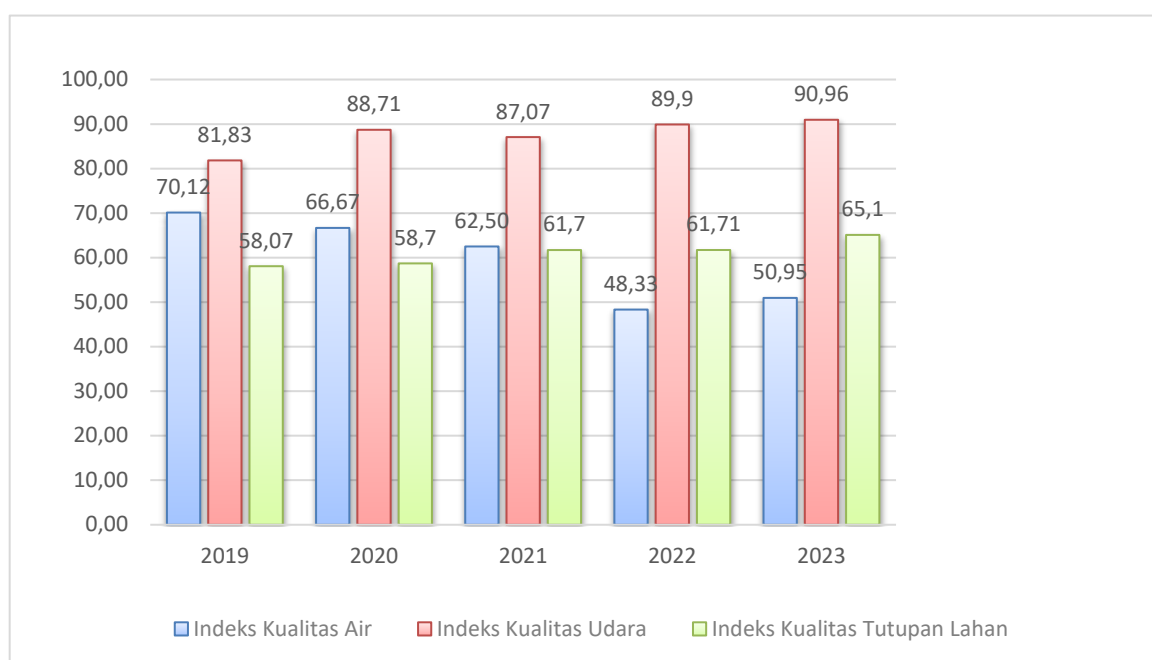


1. Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas/ Pencemaran Udara
3. Indeks Kualitas Lahan

**Grafik 3.23 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan
Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengetahui secara umum terhadap baku mutu air. Pengambilan sample air biasanya dilakukan terhadap air permukaan, seperti sungai, danau dan air permukaan lainnya yang biasa digunakan masyarakat.

IKA 81 – 100 tergolong memenuhi baku mutu;

IKA 61 – 80 tergolong tercemar ringan;

IKA 41 – 60 tergolong tercemar sedang;

IKA \leq 40 tergolong tercemar berat.



IKA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 tergolong dalam tercemar sedang dengan indeks sebesar 50,95, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 dengan indeks 48,33. IKA masih tergolong tercemar sedang ini dapat terjadi karena adanya indikasi penurunan kualitas sungai yang dilakukan pemantauan dan terbatasnya jumlah parameter uji yang dianalisa. IKA Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan 7 dari 10 kabupaten/ kota se-Kalimantan Timur dan urutan 165 dari 514 kabupaten/ kota se-Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air, yaitu:

- a. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu untuk mengetahui kualitas udara yang ada dalam suatu wilayah. Nilai IKU yang semakin tinggi menandakan bahwa kualitas udara di suatu daerah semakin baik, dan begitu pula sebaliknya. IKU Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong sangat baik karena masih dalam rentang > 80 persen. IKU Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan IKU di tahun 2023 menjadi 90,96 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 89,90. IKU Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan 4 dari 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan urutan 210 dari 514 kabupaten/ kota se-Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan kualitas udara dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam program pengendalian pencemaran udara;
- c. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambutan



Lahan. IKL juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, dari IKL 61,71 di tahun 2022 menjadi 65,1 di tahun 2023. IKL Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada posisi ke 7 dari 10 kabupaten/ kota se-Provinsi Kalimantan Timur dan ke-128 dari 514 kabupaten/ kota se-Indonesia.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan target untuk IKLH sebesar 73,59. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebesar 70,25, sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,46 persen. Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2022 yaitu 68,10, IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan. Peningkatan IKLH ini menggambarkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penghargaan daerah yang diterima terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

a. Adipura

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menerima penghargaan Adipura Tahun 2023 kategori Kota Kecil.

b. Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerima penghargaan sebagai Top Inovasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 dengan judul inovasi “SERBU GASS” (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah).

Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, antara lain:

a. Pemantauan rutin kualitas air sungai

Upaya pengendalian dan pengelolaan kualitas air sungai dilakukan dengan cara mengambil sampel air sungai dari 14 titik sampel sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengukuran rutin kualitas udara

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di beberapa lokasi yang secara proporsional mewakili wilayah pantau Kabupaten Penajam Paser Utara.



- c. Pengawasan rutin usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan RKL-RPL
Pengawasan rutin usaha dan/atau terhadap pelaksanaan RKL-RPL dilakukan secara rutin, diantaranya kegiatan pertambangan, perkebunan, industri dan lain-lain.
- d. Program Sekolah Adiwiyata
Merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- e. Peningkatan operasional angkutan sampah
Pemenuhan kebutuhan armada atau kendaraan angkutan sampah yang dibutuhkan.
- f. Inovasi SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah)
Program Inovasi SERBU GASS adalah program yang mewajibkan kelurahan/ desa membentuk minimal 2 bank sampah unit. Masyarakat di kelurahan/ desa yang telah memilah sampah dari rumah dapat menyetorkan sampah yang masih bernilai ekonomis ke bank sampah unit terdekat. Adapun sampah yang disetorkan dapat ditabung maupun disedekahkan. Hasil sedekah sampah akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- g. Inovasi SAHABAT LAMA (Sejahtera Berkat Layanan Sampah Mobile Amanah)
Inovasi SAHABAT LAMA (Sejahtera Berkat Layanan Sampah Mobile Amanah) yaitu penjemputan secara terjadwal ke Bank Sampah Unit tanpa dipungut biaya.
- h. Inovasi PELITA KESAH (Pelajar Ikut Aktif Kelola Sampah)
Melibatkan para pelajar turut serta aktif dalam pengelolaan sampah.
- i. Lomba Bank Sampah unit Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
Saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara mengadakan Lomba Bank Sampah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;



7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
10. Program Pengelolaan Pelayaran;
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
14. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
15. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
16. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
17. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

SASARAN 13

Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	100 %	92,05	92,86	100,88	92,05	100,88
2	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	80,7 Ha	25	51,57	206,29	110	172,49
Rata-rata Capaian Kinerja					153,59		136,69

1. Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah.

Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya tercapai 92,86 persen dari yang ditargetkan 92,05 persen sehingga persentase capaian sebesar 100,88 persen. Dan telah mencapai target akhir RPJMD.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penataan ruang sesuai dengan peruntukannya, antara lain yaitu:

- a. Penilaian pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- b. Penilaian perwujudan RTR;
- c. Pemberian intentif dan disinsentif;
- d. Pengenaan sanksi dan sengketa;
- e. Pengawasan perizinan;
- f. Audit pemanfaatan pengendalian ruang.



2. Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat

Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat bertambah 51,57 Ha di Tahun 2023, dengan target 25 Ha terealisasi 53,8 Ha sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 206,28 persen.

Jika dihitung penambahan jumlah Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 seluas 189,74 Ha, sehingga dengan target akhir RPJMD 110 Ha telah terealisasi sebesar 125,61 persen.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis

“Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman”, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
3. Program Penataan Bangunan Gedung.



SASARAN 14

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	22,2 %	85	53,8	63,29	85	63,29
2	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 2 Jam	< 6	< 1	600	< 6	600
3	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	95 %	80	80	100	80	100
4	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150	200	200	100	200	100
Rata-rata Capaian Kinerja					215,82		215,82

1. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Prioritas program pengurangan risiko bencana, yaitu:

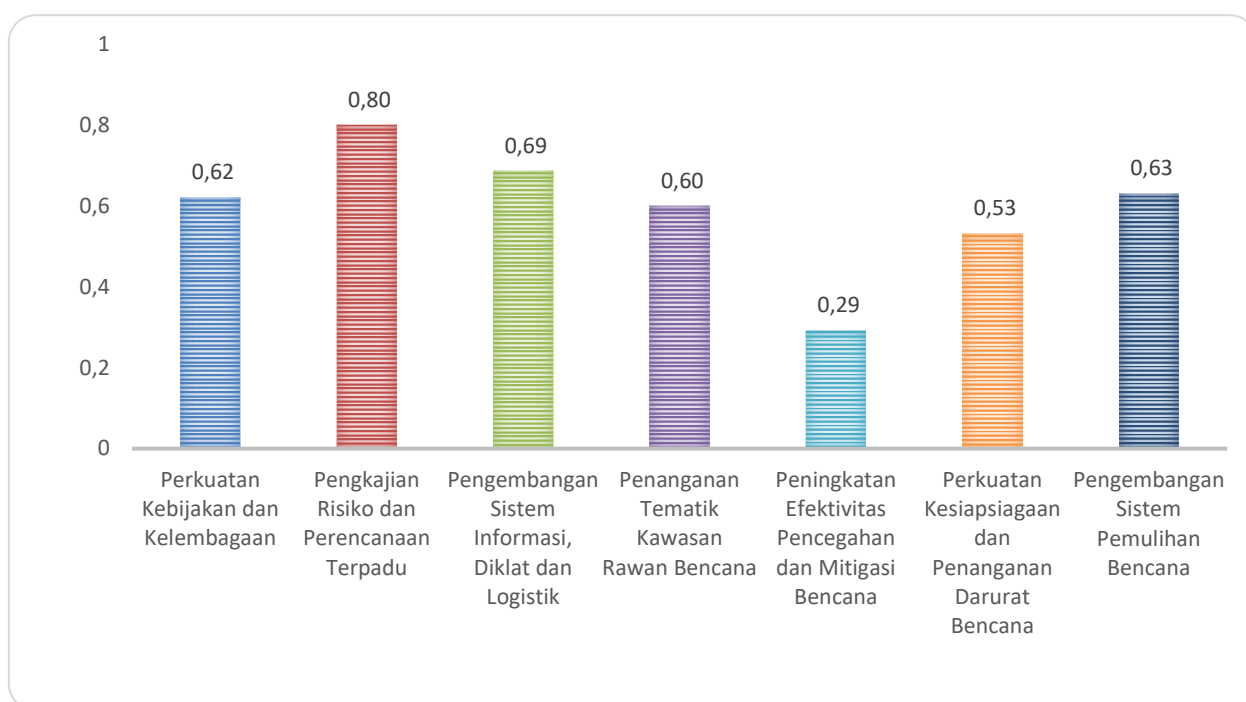
1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana



Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;

3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat;
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar;
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

**Grafik 3.24 Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023**



Sumber : BNPB, 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana. IKD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar 0,54 dengan kategori “sedang”. Sementara Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 sebesar 129,44, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 IRB 143,00.

Indikator kinerja Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Tahun 2023 terealisasi 53, persen, kurang dari yang ditargetkan 85 persen. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar 22,2 persen. Saat ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 14 desa/ kelurahan tahan bencana.



Upaya yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana, antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan kolaborasi antar SKPD agar penanggulangan dan risiko bencana dapat dikurangi;
- b. Melibatkan *stakeholder* dengan memperhatikan tiga aspek yaitu preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan;
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam penanganan bencana;
- e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat;
- f. Meningkatkan jumlah desa/ kelurahan tahan bencana.

2. Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana adalah waktu yang dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari sejak pertama kali menerima informasi kejadian bencana, hingga tiba di lokasi kejadian bencana.

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana Tahun 2023 ditargetkan tidak lebih dari 6 jam (< 6 jam) dapat terealisasi tidak lebih dari 1 jam (< 1 jam), sehingga capaian kinerja sebesar 600 persen. Realisasi Kinerja Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu < 6 jam telah tercapai melebihi target.



Penanganan Tanah Longsor

Upaya yang dilakukan sehingga Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana dapat tercapai, yaitu:

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan personil Satuan Tugas Rescue yang semakin baik;
- b. Monitoring kejadian bencana dari Tim Pusdalops dengan menerapkan shift jaga 24 jam;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- d. Meningkatkan akses perhubungan seperti kondisi jalan agar semakin baik.



3. Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Tahun 2023 Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Realisasi Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tahun 2023 sebesar 80 persen dengan persentase capaian sebesar 100 persen.

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah :

- Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
- Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat;
- Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/ kerusakan serta kendala medan);
- Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya;
- Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.



Bantuan Terdampak Angin Puting Beliung

Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi ini adalah:

- Melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum;
- Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui program yang mengacu kepada kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
- Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi, baik ketika perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakkan aturan-aturan yang ada,



- untuk menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa yang akan datang;
- d. Mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sementara;
 - e. Memberikan perhatian khusus kepada usaha-usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
 - f. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek, melalui pelibatan sebanyak-banyaknya berbagai pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi.

4. Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan terealisasi seluas 200 Ha, dengan realisasi capaian sebesar 100 persen, telah mencapai target yang direncanakan 200 Ha. Realisasi capaian kinerja tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kebakaran hutan, yaitu dengan memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak membakar hutan/ lahan mereka, selain itu adanya kebijakan pemerintah tentang ancaman bagi pembakar hutan/ lahan membuat para pelaku pembakar lahan berfikir dua kali untuk melakukan aksinya, ditambah beberapa kasus penindakan terhadap pelaku pembakar lahan yang berujung di tahanan Polres Penajam Paser Utara jelas menunjukkan bahwa kebakaran hutan/ lahan bukan hal yang bisa diremehkan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kedepannya akan terus meningkatkan kinerja pelayanan ke masyarakat demi menjaga keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran dan penyelamatan dari hewan berbahaya dan berbisa. Pada Tahun 2019 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menggagas inovasi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran mandiri untuk desa sebagai solusi untuk pencegahan dini terjadinya kebakaran di



setiap desa/ kelurahan, sehingga desa/ kelurahan dapat secara mandiri melakukan pencegahan kebakaran di wilayah mereka masing-masing sebelum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan datang untuk memberi bantuan dengan armada pemadam kebakaran.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan”, yaitu :

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

SASARAN 15

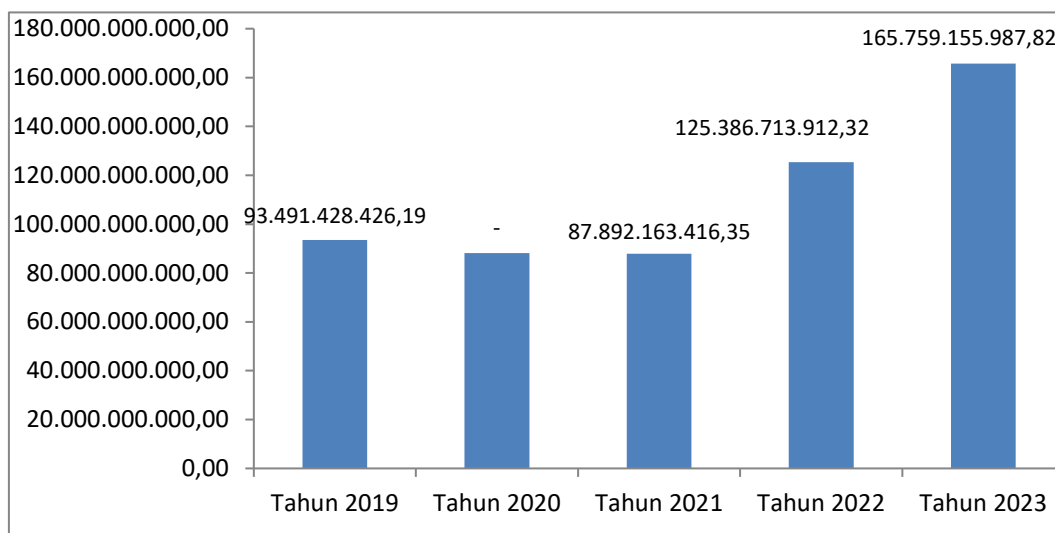
Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan PAD	125.386.713.912,32 Rp	90.930.961.128	165.759.155.987,82	182,29	1.364.708.196.224	41,08
Rata-rata Capaian Kinerja					182,29		41,08

Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Grafik 3.25 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 - 2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah Rp 119.475.873.987,60. Jumlah ini meningkat sebesar 32,20 persen dibanding PAD tahun 2022 dengan PAD sebesar Rp 125.386.713.912,32. Realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sudah mencapai melebihi target PAD yang ditetapkan pada dokumen RKPD sebesar Rp 90.930.961.128,00 dengan capaian sebesar 182,29 persen. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 27.003.053.216, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 13.072.626.107, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 2.771.713.802,07 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 122.911.762.862,75.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain yaitu:

- Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;
- Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;



- e. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi”, yaitu :
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

SASARAN 16

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B	B	B	100	B	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Predikat Akuntabilitas (LKjIP)

Predikat Akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangkamendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 memperoleh nilai 61,12 atau predikat “B”, meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 60,26. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Berikut ini rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 dimana seluruhnya telah ditindaklanjuti, sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Rekomendasi dan Tindaklanjut Atas Hasil
Evaluasi AKIP Oleh KemenPAN RB RI Tahun 2023**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun Renstra PD tahun 2024-2026 serta dokumen Renja, RKPD, RKT, RKA, dan PK secara berjenjang dari tingkat kepala daerah sampai penanggung jawab kegiatan di tingkat PD yang selaras dengan RPD 2024-2026	Dokumen RKPD telah ada, Dokumen Renstra, Renja, RKT, RKA, dan PK seluruh perangkat daerah telah ada dan telah disusun secara berjenjang dari tingkat kepala daerah sampai dengan individu di setiap perangkat daerah yang selaras dengan RPD.
2	Agar melakukan pembaruan dokumen perencanaan setiap tahunnya pada portal resmi instansi atau portal ESR	Pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah telah mengupload dokumen AKIP pada portal ESR
3	Sasaran kinerja dalam dokumen perencanaan agar selaras dari perencanaan jangka menengah (5 tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan)	Periode RPJMD 2018-2023 berakhir. Sasaran kinerja pada RPD 2024-2026 telah selaras dengan RKPD, Renstra hingga PK Perangkat Daerah
4	Mereviu dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART	Dokumen perencanaan telah direviu sehingga sasaran dan indikator telah SMART dan berdampak hasil
5	Agar rumusan kinerja PD berangkat dari isu strategis dan alasan utama eksistensi PD serta sesuai fungsi PD	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi rumusan kinerja telah disusun berdasarkan isu strategis daerah yang ada serta sesuai dengan tugas dan fungsi PD



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis sehingga menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja, proses penjabaran kinerja yang tergambar pada pohon kinerja dan peta kinerja. - Telah disusun dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah, dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah akan diselesaikan.
7	Memastikan pengukuran kinerja disertai data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai	Data yang ada dalam pengukuran kinerja telah melalui tahap SOP Pengumpulan Data Kinerja
8	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja dan menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - E-SAKIP pemerintah daerah akan ada dalam waktu dekat; - Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan sudah disusun dan proses pengesahan
9	Menjadikan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Hasil pengukuran kinerja akan dijadikan dasar pemberian <i>reward</i> atau <i>punishment</i>
10	Mengunggah LPPD dan LKJ PD dalam website milik Pemda maupun OPD	Dokumen LPPD dan Laporan Kinerja PD telah ditampilkan dalam website Pemda serta masing-masing OPD
11	Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah telah diperbaiki dengan lebih aktif lagi menggali data dari PD terkait. - Dokumen laporan kinerja PD telah diperbaiki



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
12	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan realisasi target kinerja lebih baik nilainya dibanding tahun sebelumnya, sehingga target kinerja lebih realistis	Target kinerja telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan tahunan, dan target kinerja tahunan diupayakan semakin meningkat
13	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan gambaran langkah perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kemen PAN & RB RI telah ditindaklanjuti; - Rekomendasi hasil evaluasi internal atas AKIP PD telah ditindaklanjuti.
14	Hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian penilaian <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> kepada OPD	Hasil evaluasi AKIP internal telah dijadikan dasar penilaian <i>reward</i> pemberian penghargaan kategori nilai AKIP terbaik

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, yaitu :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



SASARAN 17

Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Berbasis Web

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	48 Aplikasi	68	72	105,88	68	100
Rata-rata Capaian Kinerja					105,88		100

Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi

Paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*), hal ini sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Prinsip - prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan *e-government*.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berusaha membuat dan mengembangkan berbagai aplikasi yang menyajikan berbagai data dan informasi yang memberikan kemudahan dalam aksesibilitas.

Tahun 2023 realisasi atas Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 72 aplikasi. Jumlah 72 aplikasi ini merupakan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menggunakan sub domain *penajamkab.go.id*. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 48 aplikasi. Capaian indikator ini telah melebihi yang ditargetkan 68 aplikasi dengan capaian sebesar 105,88 persen. Optimalisasi atas aplikasi layanan publik yang berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu manajemen jaringan, hal tersebut mengakibatkan kurangnya control atas pemakaian serta pemeliharaan aplikasi tersebut. Proses integrasi aplikasi tersebut terkendala dengan adanya Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web”, yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Aplikasi Informatika.

SASARAN 18

Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus	0	0	100	0	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama

Cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah menimbulkan berbagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama dan kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu, dengan harapan konflik di antara umat beragama akan redam jika antar pemeluk agama saling toleran.

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ditemukan atau tidak ada kasus/ konflik, hal ini dikarenakan tetap terjaganya suasana yang kondusif. Kasus/ konflik bernuansa agama dapat dihindari dengan berbagai upaya, seperti:

- a. Melakukan Pembinaan dan koordinasi rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi keagamaan;



- b. Meningkatkan peran organisasi keagamaan;
- c. Memperingati hari-hari besar keagamaan;
- d. Melaksanakan dialog-dialog lintas umat beragama;
- e. Melaksanakan dialog-dialog kebangsaan;
- f. Melakukan pembinaan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta organisasi paguyuban yang ada;
- g. Melakukan koordinasi dengan paguyuban-paguyuban dan organisasi sosial budaya lainnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama”, yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

SASARAN 19

Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan

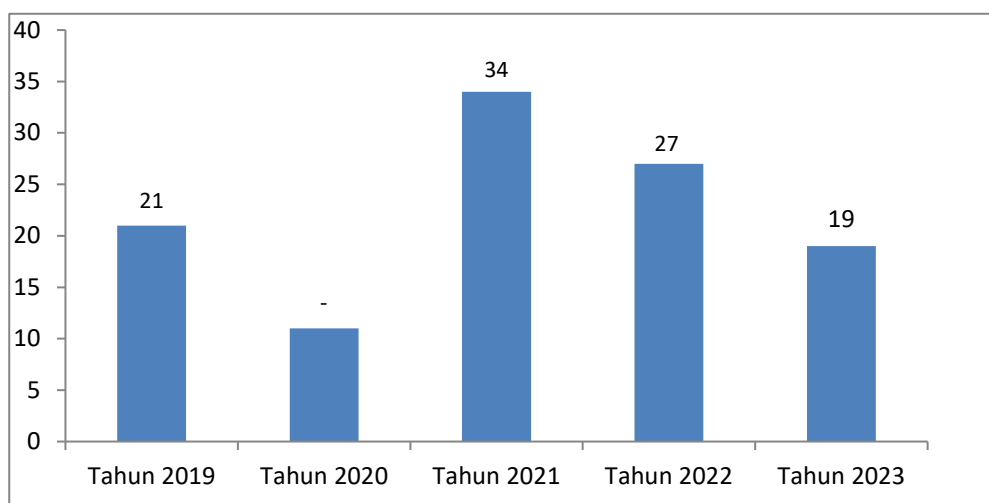
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	89	100	112,36	90	111,11
Rata-rata Capaian Kinerja					112,36		111,11

Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian indikator kinerja Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2023 terealisasi 112,36 persen, melebihi dari yang ditargetkan 88 persen. Jumlah pelanggaran peraturan daerah/ peraturan kepala daerah mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 19 kasus dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 27

kasus. Masih adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Tahun 2023 dikarenakan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perbup. Jumlah kasus ini juga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

**Grafik 3.26 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/ Perkada
Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu:

1. Secara intens melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/perkada;
2. Melakukan sosialisasi perda/ perkada secara masif kepada masyarakat;
3. Melakukan pembinaan dan peringatan dalam rangka menekan angka pelanggaran perda/perkada.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Peraturan Perundang-Undangan”, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Hasil capaian kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023 secara umum dapat mencapai target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 19 sasaran yang ditargetkan, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai



capaian kinerja sasaran sebesar 382,83 persen dengan interpretasi “*sangat memuaskan*”. Demikian juga dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD, tercapia dengan “*sangat memuaskan*” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 359,75.

Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12 Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2023 (%)	Interpretasi	Rata-rata Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD	Interpretasi
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	953,67	Sangat Memuaskan	953,67	Sangat Memuaskan
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	142,51	Sangat Memuaskan	142,51	Sangat Memuaskan
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	83,33	Memuaskan	83,33	Memuaskan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	87,42	Memuaskan	87,42	Memuaskan
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	3.300	Sangat Memuaskan	3.300	Sangat Memuaskan
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,41	Sangat Baik	77,41	Sangat Baik
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	117,31	Sangat Memuaskan	117,31	Sangat Memuaskan
	Meningkatkan distribusi pangan	87,41	Memuaskan	87,41	Memuaskan
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	304,20	Sangat Memuaskan	304,20	Sangat Memuaskan
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	566,67	Sangat Memuaskan	281,24	Sangat Memuaskan
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	362,98	Sangat Memuaskan	362,98	Sangat Memuaskan



Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2023 (%)	Interpretasi	Rata-rata Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD	Interpretasi
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	220,87	Sangat Memuaskan	233,04	Sangat Memuaskan
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	153,59	Sangat Memuaskan	136,69	Sangat Memuaskan
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	215,82	Sangat Memuaskan	215,82	Sangat Memuaskan
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	182,29	Sangat Memuaskan	41,08	Kurang
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	100	Sangat Memuaskan	100	Sangat Memuaskan
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	105,88	Sangat Memuaskan	100	Sangat Memuaskan
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100	Sangat Memuaskan	100	Sangat Memuaskan
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	112,36	Sangat Memuaskan	111,11	Sangat Memuaskan
Rata-rata Nilai Capaian Kinerja		382,83	Sangat Memuaskan	359,75	Sangat Memuaskan

B

Realisasi Anggaran

Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan



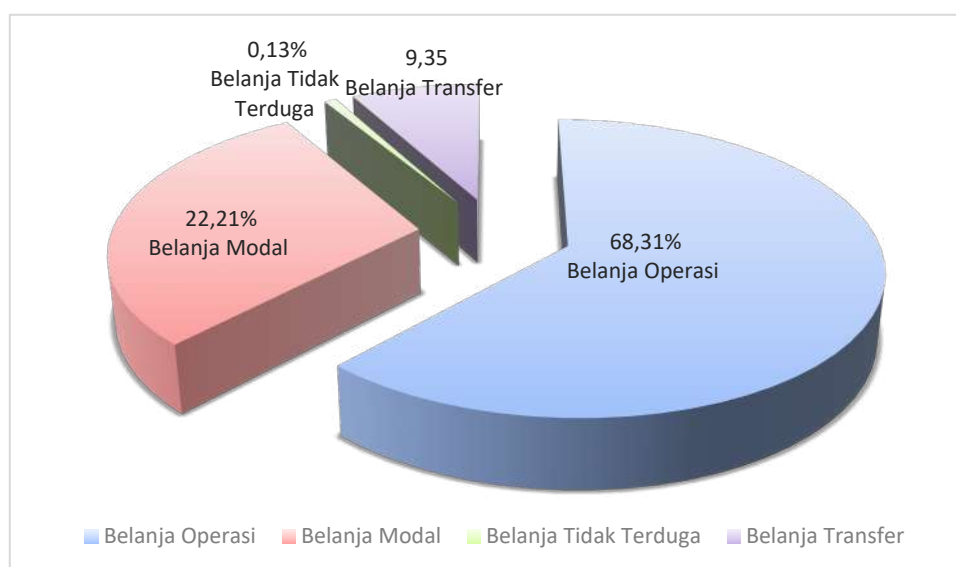
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 sebesar Rp 2.151.101.515.043,00 dengan rincian sebagai realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 2.252.747.559.375,91 dan realisasi belanja sebesar Rp 2.084.685.967.508,52 sehingga terjadi surplus sebesar Rp 168.061.591.867,39. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 300.563.236.270,62 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 187.632.320.043,23.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.291.666.216.905,03, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 612.173.752.479,49, Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 15.411.994.072,00, dan Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 165.434.004.052,00.

Grafik 3.27 Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2023 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 187.632.320.043,23 bertambah sebesar Rp 145.953.103.672,12 dibanding



Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 yang sebesar Rp 41.679.216.371,11. Pada Tahun 2023 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sejumlah Rp 55.130.675.640,00, sehingga di tahun 2023 Pembiayaan Neto Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 132.501.644.403,23.

Tabel 3.13 Laporan Realisasi APBD T.A 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	2.151.101.515.043,00	2.252.747.559.375,91	104,73%	1.757.844.430.423,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	6.308.506.542,00	27.163.606.283,00	103,25%	46.010.036.795,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.735.703.947,00	13.971.122.644,00	130,14%	8.306.854.374,00
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.318.899.829,00	2.771.713.802,07	119,53%	2.671.835.979,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	57.746.673.429,00	81.088.144.365,27	140,42%	68.397.986.763,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		97.109.783.747,00	124.994.587.094,34	128,71%	125.386.713.912,32
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	1.307.073.092.481,00	1.361.861.300.165,00	104,19%	951.130.704.178,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	287.311.660.000,00	287.297.358.273,00	100,00%	262.161.465.209,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	62.117.813.000,00	56.150.254.530,00	90,39%	34.399.833.646,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	95.838.239.000,00	90.198.557.197,57	94,12%	45.943.929.789,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.752.340.804.481,00	1.795.507.470.165,57	102,46%	1.293.635.932.822,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	-	5.913.954.000,00	-	18.401.226.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	28.440.430.000,00	29.452.924.000,00	103,56%	27.029.362.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		28.440.430.000,00	35.366.878.000,00	124,35%	45.430.588.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	196.859.125.215,00	211.087.744.137,00	107,23%	147.916.241.258,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	72.070.000.000,00	72.070.000.000,00	100,00%	112.748.950.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		268.929.125.215,00	283.157.744.137,00	105,29%	260.665.191.258,00
Total Pendapatan Transfer		2.049.710.359.696,00	2.114.032.092.302,57	103,14%	1.599.731.712.080,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	4.281.371.600,00	3.265.871.600,00	76,28%	1.641.068.478,00



Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
Pendapatan lainnya	5.1.1.3.2	-	10.455.008.379,00	-	31.084.935.953,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		4.281.371.600,00	13.720.879.979,00	320,48%	32.726.004.431,00
Jumlah Pendapatan		2.151.101.515.043,00	2.252.747.559.375,91	104,73%	1.757.844.430.423,32
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	594.452.185.561,00	562.618.503.072,60	94,64%	511.854.352.851,60
Belanja Barang	5.1.2.1.2	724.697.781.060,00	666.679.927.300,43	91,99%	482.164.061.155,34
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	13.640.845.919,00	13.340.442.349,00	97,80%	22.653.806.633,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	52.783.925.689,00	48.548.844.183,00	91,98%	26.723.150.276,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.196.050.000,00	478.500.000,00	40,01%	10.013.670.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.386.770.788.229,00	1.291.666.216.905,03	93,14%	1.053.409.040.915,94
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	45.392.474.961,00	5.544.298.893,00	12,21%	7.503.359.371,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	178.324.755.985,00	170.110.092.092,00	95,39%	46.866.781.838,72
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	157.597.549.980,00	139.692.870.320,65	88,64%	53.251.596.734,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	318.978.704.268,00	290.726.374.346,84	91,14%	231.938.512.822,82
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.736.667.221,00	4.427.546.827,00	93,47%	2.969.658.694,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.805.374.568,00	1.672.570.000,00	92,64%	-
Jumlah Belanja Modal		706.835.526.983,00	612.173.752.479,49	86,61%	342.529.909.461,26
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%	2.041.572.492,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%	2.041.572.492,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	-	-		-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.4.2	168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%	144.145.459.332,00
Jumlah Belanja Transfer		168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%	144.145.459.332,00
Jumlah Belanja		2.283.603.159.446,00	2.084.685.967.508,52	91,29%	1.542.125.982.201,20
Surplus/ (Defisit)		(132.501.644.403,00)	168.061.591.867,39	-126,84%	215.718.448.222,12
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
PENGELUARAN DAERAH	5.1.3.2	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	69.765.344.550,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	5.852.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.2	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	63.913.344.550,00
		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran		55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	69.765.344.550,00
Pembiayaan Neto	5.1.4	132.501.644.403,00	132.501.644.403,23	100,00%	(28.086.128.178,89)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.1	-	300.563.236.270,62	-	187.632.320.043,23



Realisasi anggaran pada program-program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2023 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2023

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.000.832.279,00	1.554.931.717,00	77,71
2	Program administrasi pemerintahan desa	1.977.519.060,00	1.610.727.703,00	81,45
3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	35.688.251.684,00	31.096.154.531,00	87,13
4	Program hubungan industrial	733.840.000,00	726.624.525,00	99,02
5	Program kepegawaian daerah	3.706.123.869,00	2.810.039.004,00	75,82
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.347.804.449,00	1.106.868.671,00	82,12
7	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
8	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.083.094.551,00	705.395.606,00	65,13
9	Program pelayanan penanaman modal	336.053.630,00	260.601.034,00	77,55
10	Program pemasaran pariwisata	1.300.688.825,00	1.284.184.984,00	98,73
11	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	75.399.500,00	67.913.050,00	90,07
12	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1.244.445.200,00	1.114.841.660,00	89,59
13	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	119.415.900,00	113.615.400,00	95,14
14	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.648.054.686,00	1.981.190.786,00	74,82
15	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	952.339.010,00	842.440.066,00	88,46
16	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	14.657.967.183,00	13.166.888.105,00	89,83
17	Program pemberdayaan sosial	1.128.044.188,00	1.080.474.565,00	95,78
18	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	66.088.000,00	50.073.708,00	75,77
19	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.188.070.401,00	775.492.142,00	65,27
20	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	98.304.945,00	86.670.235,00	88,16
21	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	130.148.000,00	119.617.102,00	91,91
22	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	1.767.232.371,00	1.499.402.448,00	84,84
23	Program pembinaan perpustakaan	3.161.516.515,00	2.977.450.411,00	94,18
24	Program pemenuhan hak anak (PHA)	115.651.558,00	94.452.933,00	81,67
25	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	174.414.307.286,00	178.256.878.046,22	102,20
26	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	32.957.968.417,00	27.464.916.988,00	83,33
27	Program penanganan bencana	84.750.043,00	73.031.200,00	86,17
28	Program penanganan kerawanan pangan	68.290.090,00	68.179.329,00	99,84



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
29	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	10.025.000,00	8.300.000,00	82,79
30	Program penanggulangan bencana	3.208.320.333,00	2.734.624.815,00	85,24
31	Program penataan bangunan dan lingkungannya	41.305.371.524,00	33.668.487.214,00	81,51
32	Program penataan bangunan gedung	95.308.373.605,00	83.287.953.317,00	87,39
33	Program penataan desa	419.136.586,00	125.075.356,00	29,84
34	Program penatagunaan tanah	494.222.770,00	477.099.650,00	96,54
35	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.961.824.747,00	1.771.147.027,00	90,28
36	Program penelitian dan pengembangan daerah	744.107.600,00	697.498.227,00	93,74
37	Program penempatan tenaga kerja	200.000.000,00	197.921.448,00	98,96
38	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	653.923.195,00	583.404.515,00	89,22
39	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	7.500.000,00	7.460.000,00	99,47
40	Program pengawasan keamanan pangan	79.902.822,00	72.604.290,00	90,87
41	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.108.908.574,00	1.777.688.629,00	84,29
42	Program pengelolaan arsip	432.845.810,00	421.488.387,00	97,38
43	Program pengelolaan barang milik daerah	2.644.821.590,00	1.656.531.976,00	62,63
44	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	200.150.000,00	191.505.350,00	95,68
45	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	48.361.144.410,00	46.057.533.452,00	95,24
46	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	13.050.885.114,00	12.754.180.952,00	97,73
47	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	65.235.100,00	56.857.560,00	87,16
48	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	11.746.586.561,00	11.170.110.402,50	95,09
49	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	13.081.955.206,00	12.850.494.935,00	98,23
50	Program pengelolaan keuangan daerah	213.053.228.255,00	200.960.627.070,00	94,32
51	Program pengelolaan pelayaran	1.060.137.114,00	908.922.472,09	85,74
52	Program pengelolaan pendapatan daerah	2.410.473.078,00	2.025.774.257,00	84,04
53	Program pengelolaan pendidikan	184.894.613.018,00	172.720.449.054,50	93,42
54	Program pengelolaan perikanan budidaya	6.574.919.338,00	6.134.970.622,00	93,31
55	Program pengelolaan perikanan tangkap	11.399.936.865,00	10.929.037.037,00	95,87
56	Program pengelolaan persampahan	13.964.419.655,00	10.811.396.515,00	77,42
57	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	10.934.121.199,00	8.769.061.082,00	80,20
58	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	30.735.000,00	28.564.550,00	92,94
59	Program pengembangan iklim penanaman modal	427.903.350,00	353.564.884,00	82,63
60	Program pengembangan jasa konstruksi	549.909.500,00	404.455.275,00	73,55
61	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	11.393.059.424,00	11.024.126.082,00	96,76
62	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	684.915.068,00	469.927.428,00	68,61
63	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	2.130.000.000,00	2.126.000.000,00	99,81



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
64	Program pengembangan kebudayaan	857.661.973,00	778.875.022,00	90,81
65	Program pengembangan kesenian tradisional	686.158.182,00	569.724.100,00	83,03
66	Program pengembangan permukiman	897.425.481,00	855.682.640,00	95,35
67	Program pengembangan perumahan	23.173.625.783,00	21.526.885.731,00	92,89
68	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	462.554.897,00	387.312.861,00	83,73
69	Program pengembangan UMKM	779.106.670,00	572.466.155,00	73,48
70	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	37.110.000,00	26.329.802,00	70,95
71	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	2.267.433.034,00	1.959.020.607,00	86,40
72	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	723.419.454,00	646.335.296,00	89,34
73	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	575.209.100,00	320.706.330,00	55,75
74	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.089.862.433,00	865.466.780,00	79,41
75	Program pengendalian penduduk	267.404.013,00	249.558.012,00	93,33
76	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	217.849.570,00	216.375.673,00	99,32
77	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.264.515.202,00	1.252.893.907,00	99,08
78	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.931.019.760,00	1.741.956.454,00	90,21
79	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	728.364.376,00	626.765.114,00	86,05
80	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	617.953.562,00	601.062.917,00	97,27
81	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	825.158.307,00	707.450.829,00	85,74
82	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.384.012.113,00	1.133.970.166,00	81,93
83	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	199.584.000,00	193.951.425,00	97,18
84	Program peningkatan kualitas keluarga	26.938.802,00	25.527.137,00	94,76
85	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	50.250.000,00	48.734.550,00	96,98
86	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	15.478.275.680,00	15.385.750.200,00	99,40
87	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	9.660.057.000,00	9.463.548.429,00	97,97
88	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	5.746.198.825,00	3.958.166.866,00	68,88
89	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	851.547.192.522,00	798.927.653.041,44	93,82
90	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	13.453.495.493,00	12.890.734.148,77	95,82
91	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	23.445.975.600,00	21.794.179.616,00	92,95
92	Program penyelenggaraan jalan	296.440.422.586,00	233.813.387.602,00	78,87
93	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1.405.692.886,00	1.218.697.671,00	86,70
94	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	24.854.024.273,00	23.835.451.222,00	95,90



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
95	Program penyelenggaraan penataan ruang	2.831.280.353,00	1.794.899.818,00	63,40
96	Program penyelenggaraan pengawasan	1.544.012.690,00	1.136.618.770,00	73,61
97	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	777.600.702,00	604.430.440,00	77,73
98	Program penyelenggaraan statistik sektoral	415.155.746,00	352.700.200,00	84,96
99	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	577.592.723,00	513.709.400,00	88,94
100	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	686.156.400,00	460.317.214,00	67,09
101	program penyuluhan pertanian	4.154.774.525,00	3.393.001.388,00	81,67
102	Program perekonomian dan pembangunan	5.780.821.309,00	4.794.968.927,00	82,95
103	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.578.296.800,00	1.469.465.656,00	93,10
104	Program perencanaan kawasan transmigrasi	34.000.000,00	33.877.312,00	99,64
105	Program perencanaan lingkungan hidup	296.581.550,00	238.121.624,00	80,29
106	Program perencanaan tenaga kerja	130.000.000,00	114.083.122,00	87,76
107	Program perizinan usaha pertanian	371.852.966,00	271.454.848,00	73,00
108	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.599.790.631,00	998.338.099,00	62,40
109	Program perlindungan khusus anak	201.816.550,00	163.896.325,00	81,21
110	Program perlindungan perempuan	592.236.769,00	556.689.315,00	94,00
111	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	744.185.000,00	729.279.600,00	98,00
112	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	378.010.830,00	249.976.801,00	66,13
113	Program rehabilitasi sosial	709.417.274,00	650.274.097,00	91,66
114	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	331.202.000,00	226.354.475,00	68,34
115	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	118.610.000,00	104.989.993,00	88,52
Jumlah Anggaran		2.283.603.159.446,00	2.084.685.967.508,52	91,29

C Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran



kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E : Efisiensi
 PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
 CK_i : Capaian keluaran i

Nilai Efisiensi (NE) diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%.

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\% \right)$$

NE : Nilai Efisiensi
 E : Efisiensi

Nilai Efisiensi dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.15 Skala Nilai Peringkat Efisiensi

Interval Nilai Efisiensi	Kategori
> 90	Sangat Efisien
> 80 – 90	Efisien
> 60 – 80	Cukup Efisien
> 50 – 60	Kurang Efisien
< 50	Sangat Kurang Efisien

Tabel 3.16 Pengukuran Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	953,67	10.963.584.025,00	9.030.576.123,00	91,36	100	Sangat Efisien
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	142,51	2.016.934.551,00	1.629.941.579,00	43,29	100	Sangat Efisien
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	83,33	1.404.401.180,00	991.729.808,00	15,26	88,14	Efisien
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	77,83	184.894.613.018,00	172.720.449.054,50	-20,03	-0,06	Sangat Kurang Efisien



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	85,34	184.894.613.018,00	172.720.449.054,50	-9,46	26,34	Sangat Kurang Efisien
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	99,08	176.523.006.603,00	180.033.123.416,22	-2,94	42,66	Sangat Kurang Efisien
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3.300	11.393.059.424,00	11.024.126.082,00	97,07	100	Sangat Efisien
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	63,46	1.246.159.964,00	1.140.093.830,00	-44,17	0,00	Sangat Kurang Efisien
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	91,36	317.468.108,00	258.349.258,00	10,93	100	Sangat Efisien
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	117,31	63.656.322.477,00	59.271.627.469,77	20,63	100	Sangat Efisien
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87,41	796.881.474,00	770.411.086,00	-10,60	23,49	Sangat Kurang Efisien
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	473,91	4.035.428.253,00	3.646.862.081,00	80,93	100	Sangat Efisien
		NTP	Tidak dapat ditampilkan					
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	134,48	12.083.548.470,00	11.555.553.948,00	28,89	100	Sangat Efisien
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	566,67	1.404.401.180,00	991.729.808,00	87,54	100	Sangat Efisien
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	900	20.890.747.916,00	17.659.374.092,00	90,61	100	Sangat Efisien
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	95	24.815.236.264,00	23.111.847.971,00	1,96	54,91	Kurang Efisien
		Persentase Kemiskinan	88,95	38.738.789.726,00	32.259.885.915,00	6,38	65,95	Cukup Efisien
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/ Mantap	24,09	296.440.422.586,00	233.813.387.602,00	-227,41	0,00	Sangat Kurang Efisien
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	56,06	59.295.265.609,00	54.826.594.534,00	-64,94	0,00	Sangat Kurang Efisien
		Persentase Pemukiman yang Tertata	88,09	24.815.236.264,00	23.111.847.971,00	-5,73	35,68	Sangat Kurang Efisien
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	175	13.050.885.114,00	12.754.180.952,00	44,16	100	Sangat Efisien
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	100	95.308.373.605,00	83.287.953.317,00	12,61	81,53	Efisien
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	11,39	2.465.830.000,00	2.127.620.143,09	-657,54	0,00	Sangat Kurang Efisien



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,46	14.844.828.704,00	14.314.163.797,00	-1,01	47,47	Sangat Kurang Efisien
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	100,88	139.445.025.482,00	118.751.340.349,00	15,58	88,96	Efisien
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang telah Bersertifikat	206,28	95.308.373.605,00	83.287.953.317,00	57,64	100	Sangat Efisien
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	63,29	3.208.320.333,00	2.734.624.815,00	-34,67	0,00	Sangat Kurang Efisien
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	100	3.208.320.333,00	2.734.624.815,00	14,76	86,91	Efisien
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	100	3.208.320.333,00	2.734.624.815,00	14,76	86,91	Efisien
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	100	1.961.824.747,00	1.771.147.027,00	9,72	74,30	Cukup Efisien
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	182,29	2.410.473.078,00	2.025.774.257,00	53,90	100	Sangat Efisien
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKJIP)	100	851.547.192.522,00	798.927.653.041,44	6,18	65,45	Cukup Efisien
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	105,88	12.939.343.009,00	12.127.241.042,50	11,48	78,70	Cukup Efisien
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	100	17.684.278.940,00	17.389.571.129,00	1,67	54,17	Kurang Efisien
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	112,36	1.394.012.113,00	1.143.970.166,00	26,96	100	Sangat Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian keluaran kegiatan, efisiensi, dan nilai efisiensi masing-masing keluaran bervariasi. Dari 35 indikator yang diukur terdapat 13 indikator (37,14%) Sangat Efisien, 5 indikator (14,29%) Efisien atau Baik, 4 indikator (11,43) Cukup Efisien, 2 indikator (5,71%) Kurang Efisien, dan 11 indikator (31,43) Sangat Kurang Efisien. Nilai efisiensi yang bervariasi diakibatkan oleh berbagai kendala dan telah diupayakan dengan solusi ke depan seperti yang telah disebutkan pada penjelasan capaian setiap indikator di atas.



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 rata-rata menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari 19 sasaran strategis yang ditetapkan hampir seluruhnya berhasil dicapai dengan sangat memuaskan, namun masih ada indikator kinerja sasaran yang capaiannya kurang baik atau belum optimal.

Capaian kinerja yang sudah sangat baik maupun yang belum menjadi suatu motivasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun depan. Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi bagi kendala yang ada dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh perangkat daerah pada setiap kesempatan tentang pentingnya Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan akurasi data yang dihimpun;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel, serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan di berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas.

LAMPIRAN



Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 %
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	1.087.500.000 Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,96 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,07 Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,50 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	79,70 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660 Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	13 %

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94,84	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93.027	Orang
		NTP	105	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	145	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	600	Perizinan
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal= 0 Sangat Tertinggal = 0 Desa	
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%
			100	
		Persentase kemiskinan	6,2	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	135,79	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	36,565	Ha
		Persentase Pemukimanyang Tertata	99,90	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59 Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	92,05 %
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	25 Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85 %
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 6 Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	80 %
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	90.930.961.128 Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	68 Aplikasi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89 %



Perjanjian Kinerja

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Hamdam

Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Penajam, Januari 2023
Bupati Penajam Paser Utara

Ir. H. Hamdam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 %
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi	Rp 80.228.000.000
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,96 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	15,07 Tahun
		Angka Harapan Hidup	72,50 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,70 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660 Poin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	13 %
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94,84
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata	93.027 Orang
		NTP	105
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	145 WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	600 Izin
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 2 Desa Maju = 10 Desa Berkembang= 18 Desa Tertinggal= 0 Desa Sangat Tertinggal = 0 Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 Kelurahan dan 30 Desa (100 %)
		Persentase Kemiskinan	6,2 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	135,79 Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa	36,565 Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,90 %
		Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat	200
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Bangunan/ Gedung
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	92,05 %
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	25
		Prosentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85 %
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	<6 Jam
		Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	80 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	Rp 398.682.108.348
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	68 Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743.612.005.925
2	Program Pengelolaan Pendidikan	131.150.671.054
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145.384.842.156
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.131.364.547
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	331.202.000
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	256.304.650
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.739.041.911
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.287.395.000
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200.150.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	45.496.060.074
11	Program Pengembangan Permukiman	310.984.018
12	Program Penataan Bangunan Gedung	94.814.198.752
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	37.980.696.491
14	Program Penyelenggaraan Jalan	262.989.674.187
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	549.909.500
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.694.010.753
17	Program Pengembangan Perumahan	27.642.821.326
18	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	595.090.000
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.443.600.000
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	768.205.265

No.	Program	Anggaran (Rp)
21	Program Penanggulangan Bencana	1.817.333.765
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.137.427.560
23	Program Pemberdayaan Sosial	324.334.493
24	Program Rehabilitasi Sosial	254.280.682
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	454.024.921
26	Program Penanganan Bencana	84.750.043
27	Program Perencanaan Tenaga Kerja	50.000.000
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	324.752.927
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	10.000.000
30	Program Hubungan Industrial	246.440.000
31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	339.983.242
32	Program Perlindungan Perempuan	492.173.250
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	29.999.802
34	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	39.999.570
35	Program Perlindungan Khusus Anak	129.647.170
36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	572.927.657
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan	63.330.840
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.681.473
39	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	686.156.400
40	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	310.881.550

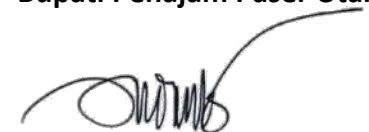
No.	Program	Anggaran (Rp)
41	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	111.562.433
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	10.646.712.775
43	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	37.110.000
44	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	48.061.000
45	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.250.000
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	29.200.000
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.195.000
48	Program Pengelolaan Persampahan	10.190.331.923
49	Program Penataan Desa	499.171.500
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.577.958.530
51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.141.548.815
52	Program Pengendalian Penduduk	149.385.000
53	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.517.501.000
54	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.244.605.420
55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	427.659.450
56	Program Pengelolaan Pelayaran	199.990.940
57	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.633.754.788
58	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	400.245.776
59	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.916.000
60	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	9.945.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
61	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	21.520.000
62	Program Pengembangan UMKM	513.599.110
63	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	427.903.350
64	Program Pelayanan Penanaman Modal	84.636.000
65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	439.917.900
66	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.999.900
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	469.937.000
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.228.649.910
69	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	930.000.000
70	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	92.940.742
71	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	13.085.000
72	Program Pengembangan Kebudayaan	370.661.008
73	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	586.208.185
74	Program Pembinaan Perpustakaan	950.989.981
75	Program Pengelolaan Arsip	99.952.193
76	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.288.701.873
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.226.384.854
78	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	611.018.378
79	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	617.865.501
80	Program Pemasaran Pariwisata	159.346.825

No.	Program	Anggaran (Rp)
81	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	161.049.277
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.621.577.085
83	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.879.318.885
84	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	326.158.899
85	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	64.819.250
86	Program Penyuluhan Pertanian	2.565.340.772
87	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.306.142.238
88	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	21.916.000
89	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	730.712.600
90	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	7.000.000
91	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.133.412.548
92	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.843.818.067
93	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	25.982.197.875
94	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.742.137.455
95	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.072.697.160
96	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	200.587.120.503
97	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	794.782.267
98	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.145.786.173
99	Program Kepegawaian Daerah	1.818.058.750
100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.073.350.400
101	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.772.632.540

No.	Program	Anggaran (Rp)
102	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	328.970.830
103	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.179.272.877
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.978.272.448
105	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000
106	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	559.342.723
107	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	705.998.998
108	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.036.557.784
109	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.274.694.000
110	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14.882.000
111	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	38.400.000
112	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	117.012.000
Jumlah Anggaran		1.891.770.208.418

Penajam, Januari 2023
Bupati Penajam Paser Utara



Ir. H. Hamdam



Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1 %	29,85 %	953,67
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 %	2,07 %	142,51
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	1.087.500.000 Rupiah	906.166.060.000 Rupiah	83,33
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,96 Tahun	8,53 Tahun	77,83
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,07 Tahun	12,86 Tahun	85,34
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,50 Tahun	71,83 Tahun	99,08
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali	99 Medali	3.300
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	79,70 %	50,58 %	63,46
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660 Skor	603 Skor	91,36
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	13 %	15,25 %	117,31
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94,84 Skor	82,90 Skor	87,41
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93.027 Orang	440.868 Orang	473,91
		NTP	105 Indeks	- Indeks	-

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	145	WUB	195	WUB	134,48
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	600	Perizinan	3.400	Perizinan	566,67
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal= 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	Mandiri = 18 Maju = 12 Berkembang = 0 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	900
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa _____%		24 kelurahan dan 30 desa _____%		95
			100		95		
			Persentase kemiskinan	6,2	%	6,97	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	135,79	Km	32,71	Km	24,09
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	36,565	Ha	20,05	Ha	56,06
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,90	%	88	%	88,09
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM	350	SPAM	175

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit	3	Unit	100
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian	79	Kejadian	11,39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	Indeks	70,25	Indeks	95,46
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	92,05	%	92,86	%	100,88
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	25	Ha	51,57	Ha	206,28
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85	%	53,8	%	63,29
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 6	Jam	< 6	Jam	100
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	80	%	80	%	100
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200	Ha	200	Ha	100
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	90.930.961.128	Rupiah	165.759.155.987,82	Rupiah	182,29
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B		B		100
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	68	Aplikasi	72	Aplikasi	105,88

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus	0	Kasus	100
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89	%	100	%	112,36

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2023 : Rp 2.283.603.159.446,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp 2.084.685.967.508,52



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	953,67	82,37	91,36	100
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	142,51	80,81	43,29	100
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	83,33	70,62	15,26	88,14
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	77,83	93,42	-20,03	-0,06
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	85,34	93,42	-9,46	26,34
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	99,08	101,99	-2,94	42,66
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3.300	96,76	97,07	100
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	63,46	91,49	-44,17	0
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	91,36	81,38	10,93	100
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	117,31	93,11	20,63	100
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87,41	96,68	-10,6	23,49
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	473,91	90,37	80,93	100
		NTP	-	-	-	-
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	134,48	95,63	28,89	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	566,67	70,62	87,54	100
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	900	84,53	90,61	100
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	95	93,14	1,96	54,91
		Persentase Kemiskinan	88,95	83,28	6,38	65,95
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/ Mantap	24,09	78,87	-227,41	0
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	56,06	92,46	-64,94	0
		Persentase Pemukiman yang Tertata	88,09	93,14	-5,73	35,68
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	175	97,73	44,16	100
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	100	87,39	12,61	81,53
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	11,39	86,28	-657,54	0
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,46	96,43	-1,01	47,47
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	100,88	85,16	15,58	88,96
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang telah Bersertifikat	206,28	87,39	57,64	100
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	63,29	85,24	-34,67	0
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	100	85,24	14,76	86,91
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	100	85,24	14,76	86,91

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	100	90,28	9,72	74,3
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	182,29	84,04	53,9	100
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	100	93,82	6,18	65,45
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	105,88	93,72	11,48	78,7
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	100	98,33	1,67	54,17
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	112,36	81,93	26,96	100
RATA - RATA			262,33	88,64	-6,69	65,76